

**PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, UKURAN PEMERINTAH  
DAERAH, TINGKAT PENDIDIKAN KEPALA DAERAH, DAN UMUR  
PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN DAERAH  
(Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia)**



**SKRIPSI**

Oleh :

Nama : Asep Sunandar

No. Mahasiswa : 19312479

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2023**

**PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, UKURAN PEMERINTAH  
DAERAH, TINGKAT PENDIDIKAN KEPALA DAERAH, DAN UMUR  
PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN DAERAH  
(Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia)**

**SKRIPSI**

Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai derajat  
Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika  
Universitas Islam Indonesia

Oleh :

Nama : Asep Sunandar

No. Mahasiswa : 19312479

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2023**

## **PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME**

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku”.

Yogyakarta, 14 Agustus 2023

Penulis



(Asep Sunandar)

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, UKURAN PEMERINTAH  
DAERAH, TINGKAT PENDIDIKAN KEPALA DAERAH, DAN UMUR  
PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN DAERAH  
(Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia)**

**SKRIPSI**

Oleh :

Asep Sunandar

19312479

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada tanggal 14 Agustus 2023

Dosen Pembimbing



(Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D., CFrA, CertIPSAS)

# BERITA ACARA

## BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

### SKRIPSI BERJUDUL

PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, UKURAN PEMERINTAH DAERAH, TINGKAT PENDIDIKAN KEPALA DAERAH, DAN UMUR PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN DAERAH

Disusun oleh : ASEP SUNANDAR

Nomor Mahasiswa : 19312479

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus pada hari, tanggal: Senin, 04 September 2023

Penguji/Pembimbing Skripsi : Johan Arifin, M.Si., Ph.D., CFra.



Penguji : Yuni Nustini, MAFIS., Ak., CA., Ph.D.

Mengetahui  
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika  
Universitas Slam Indonesia



Johan Arifin, M.Si., Ph.D., CFra., CertIPSAS.

## MOTTO

*“Life is not about finding yourself. Life is about creating yourself”*

“Maka sesungguhnya dibalik kesulitan terdapat kemudahan”

(QS. Al-Insyirah ayat 5)

“Cukuplah Allah sebagai penolong bagi kami dan Ia sebaik-baiknya pelindung”

(QS. Ali Imran ayat 3)

“Ya Allah permudahkanlah segala urusanku dan tenangkanlah hatiku”



## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alaamiin, segala puji kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala karunia, anugerah serta rahmat-Nya. Salawat serta salam tecurahkan kepada nabi besar kita, Nabi Muhammad Shalallahu'alaihi Wa Salam sehingga penulis diberikan kelancaran dalam menyelesaikan skripsi dengan judul "**PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, UKURAN PEMERINTAH DAERAH, TINGKAT PENDIDIKAN KEPALA DAERAH, DAN UMUR PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN DAERAH**". Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana dalam rangka memperoleh gelar sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.

Selama penulis menyusun dan menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas atas do'a, dukungan dan bantuan dari berbagai pihak sehingga penulis diberikan kelancaran dalam proses penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis hendak mengucapkan terimakasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan pertolongan-Nya.
2. Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan bagi seluruh umat islam.
3. Orang tua penulis yang terhormat dan tercinta: Almarhum Bapak **Arif Rahman**, Bapak **Mohammad Syukron Aziz**, dan Ibu **Nengsih** yang selalu memberikan dukungan dan do'a yang terus mengalir dalam penulis menyelesaikan skripsi ini.
4. Keluarga penulis: Adik kandung tersayang dan tercinta **Eti Nurlasan** dan Nenek tersayang Ibu **Satirah** yang selalu memberikan do'a dan nasihat kepada penulis.
5. Bapak **Johan Arifin, M.Si., Ph.D., CFA.**, selaku dosen pembimbing sekaligus Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia skripsi penulis yang selalu berusaha meluangkan waktu untuk memberikan arahan, nasihat, dan ilmu yang bermanfaat.
6. Bapak **Fathul Wahid, Prof. S.T., M.Sc., Ph.D.**, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia
7. Seluruh Dosen Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat dan pengalaman yang berharga.
8. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan teman-teman group seperbimbingan dibawah bimbingan bapak Johan yang selalu memberikan semangat satu sama lain dalam proses penyusunan skripsi.

9. Teman-teman mahasiswa Program studi Akuntansi 2019 yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.
10. Seluruh pihak yang secara tidak langsung atau langsung membantu terkait proses penyusunan skripsi penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis berharap semoga Allah SWT memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam proses menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi yang penulis buat jauh dari kata sempurna dan masih terdapat kekurangan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca dan pihak yang membutuhkan.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi wabarokatuh



Yogyakarta, 14 Agustus 2023  
Penulis

Asep Sunandar



## DAFTAR ISI

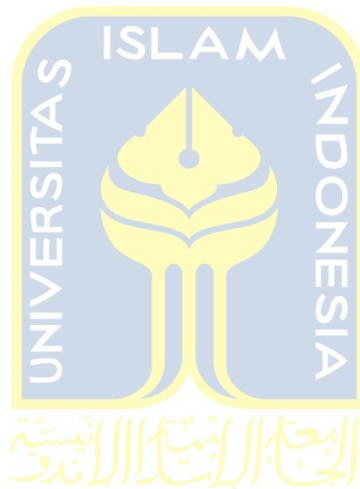
HALAMAN COVER .....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
BERITA ACARA .....	v
MOTTO .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiv
ABSTRAK .....	xvi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Manfaat Penelitian .....	8
1.5 Sistematika Penulisan .....	9
BAB II LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA .....	11
2.1 Landasan Teori .....	11
2.1.1 Teori institusional .....	11
2.1.2 Kinerja keuangan pemerintah .....	13
2.1.3 Pertumbuhan ekonomi .....	15
2.1.4 Ukuran pemerintah daerah .....	17
2.1.5 Tingkat Pendidikan kepala daerah .....	18
2.1.6 Umur pemerintah daerah .....	19

2.2 Penelitian Terdahulu .....	20
2.3 Hipotesis Penelitian .....	27
2.3.1 Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah .....	27
2.3.2 Pengaruh ukuran pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah .....	28
2.3.3 Pengaruh tingkat pendidikan kepala daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah .....	29
2.3.4 Pengaruh umur pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah .....	30
2.4 Kerangka Penelitian .....	32
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>33</b>
3.1 Populasi dan Sampel .....	33
3.1.1 Populasi .....	33
3.1.2 Sampel .....	33
3.2 Sumber dan Metode Pengumpulan Data .....	34
3.2.1 Sumber data .....	34
3.2.2 Metode pengumpulan data .....	35
3.3 Definisi Operasional Variabel .....	35
3.3.1 Variabel dependen .....	35
3.3.2 Variabel Independen .....	36
3.3.3 Variabel kontrol .....	40
3.4 Metode Analisis Data .....	41
3.4.1 Statistik deskriptif .....	41
3.4.2 Uji parsial (Uji T) .....	41
3.4.3 Analisis koefisien determinasi .....	42
3.4.4 Uji asumsi klasik .....	42
3.4.5 Analisis regresi linear berganda .....	44
<b>BAB IV DATA DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>46</b>

4.1 Deskripsi Objek Penelitian .....	46
4.2 Analisis Statistik Deskriptif .....	47
4.3 Uji Parsial (Uji T) .....	50
4.4 Analisis Koefisien Determinasi .....	52
4.5 Uji Asumsi Klasik.....	52
4.5.1 Uji normalitas.....	53
4.5.2 Uji multikolinearitas.....	55
4.5.3 Uji heteroskedastisitas.....	56
4.6 Analisis Regresi Linear Berganda .....	58
4.7 Pembahasan .....	62
4.7.1 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah .....	62
4.7.2 Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah .....	64
4.7.3 Pengaruh Tingkat Pendidikan Kepala Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah .....	67
4.7.4 Pengaruh Umur Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah .....	68
4.7.5 Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah .....	71
4.7.6 Pengaruh Umur Kepala Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah .....	72
BAB V KESIMPULAN .....	74
5.1 Kesimpulan .....	74
5.2 Keterbatasan Penelitian.....	76
5.3 Saran .....	77
DAFTAR PUSTAKA.....	80
LAMPIRAN .....	84

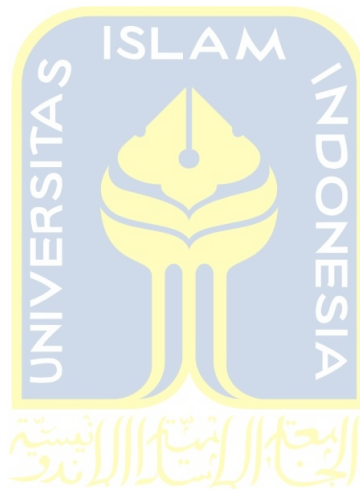
## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	<b>Statistik Deskriptif</b> .....	47
Tabel 4.2	<b>Tingkat Pendidikan Kepala Daerah</b> .....	49
Tabel 4.3	<b>Uji T</b> .....	50
Tabel 4.4	<b>Analisis Koefisien Determinasi</b> .....	52
Tabel 4.5	<b>Uji Normalitas <i>One-Sample Kolmogrov-Smirnov</i></b> .....	53
Tabel 4.6	<b>Uji Multikolinearitas</b> .....	56
Tabel 4.7	<b>Uji Heteroskedastisitas</b> .....	57
Tabel 4.8	<b>Analisis Linear Berganda</b> .....	60



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	<b>Kerangka Penelitian</b> .....	32
Gambar 4.1	<b>Histogram Uji Normalitas</b> .....	54
Gambar 4.2	<b>P-P Plot Uji Normalitas</b> .....	54
Gambar 4.3	<b>Uji Heteroskedastisitas <i>Scatterplot</i></b> .....	58



## DAFTAR LAMPIRAN

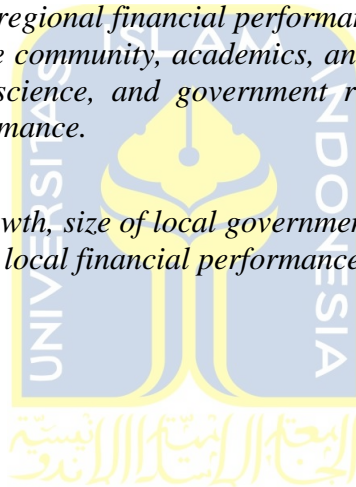
LAMPIRAN	1 Daftar Sampel Kabupaten dan Kota .....	84
LAMPIRAN	2 Data Penelitian.....	88
LAMPIRAN	3 Hasil Perhitungan Kinerja Keuangan Menggunakan Rasio Pertumbuhan Keuangan Daerah .....	91
LAMPIRAN	4 Hasil Perhitungan Pertumbuhan Ekonomi .....	95
LAMPIRAN	5 Tingkat Pendidikan Kepala Daerah .....	99
LAMPIRAN	6 Umur Pemerintah Daerah .....	103
LAMPIRAN	7 Indeks Pembangunan Manusia .....	107
LAMPIRAN	8 Umur Kepala Daerah .....	111
LAMPIRAN	9 Statistik Deskriptif .....	115
LAMPIRAN	10 Uji Asumsi Klasik .....	116
LAMPIRAN	11 Analisis Regresi .....	120



## ABSTRACT

*The purpose of this study is to empirically test the influence of economic growth, size of local government, education level of regional heads, and age of local government on local government financial performance by measuring financial performance using the ratio of regional financial growth in Regency / City local governments in Indonesia. This study adopts institutional theory as the model for research development in interpreting research results. This study used a sample of 125 regencies / cities in Indonesia using purposive sampling technique. The data analysis technique in this study used SPSS version 26 through multiple linear regression analysis. The results of this study state that economic growth, local government size, and local government age do not significantly effect on local government financial performance, in contrast to the education level of regional heads which has a positive and significant effect on regional financial performance. This research is expected to encourage the role of the community, academics, and government in building public awareness, developing science, and government responsibility in showing better regional financial performance.*

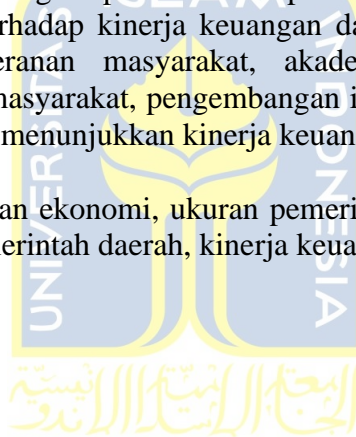
**Keywords:** *economic growth, size of local government, education level of local head, age of local government, local financial performance.*



## ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris pengaruh pertumbuhan ekonomi, ukuran pemerintah daerah, tingkat pendidikan kepala daerah, dan umur pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dengan pengukuran kinerja keuangan menggunakan rasio pertumbuhan keuangan daerah pada pemerintahan daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. Penelitian ini mengadopsi teori institusional sebagai dasar pengembangan penelitian dan dalam menginterpretasi hasil riset. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 125 Kabupaten/Kota di Indonesia dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan SPSS versi 26 melalui analisis regresi linear berganda. Hasil pada penelitian ini menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi, ukuran pemerintah daerah, dan umur pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, berbeda dengan tingkat pendidikan kepala daerah yang memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Penelitian ini diharapkan mampu mendorong peranan masyarakat, akademisi, dan pemerintah dalam membangun kesadaran masyarakat, pengembangan ilmu pengetahuan, dan tanggung jawab pemerintah dalam menunjukkan kinerja keuangan daerah yang lebih baik.

**Kata Kunci:** pertumbuhan ekonomi, ukuran pemerintah daerah, tingkat Pendidikan kepala daerah, umur pemerintah daerah, kinerja keuangan daerah.





# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Penyelenggaraan pemerintah daerah adalah upaya yang berfokus untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan adanya berbagai peningkatan aspek dengan tetap memperhatikan prinsip yang telah ditetapkan oleh sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan pemerintah daerah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas tidak lepas dari berbagai aspek serta hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang diwujudkan dalam sistem desentralisasi. Desentralisasi merupakan bentuk upaya pemerintah daerah melaksanakan kekuasaannya yang telah diserahkan pemerintah pusat yang selanjutnya terbentuk perwujudan otonomi daerah. Otonomi daerah adalah bentuk kebebasan yang dimiliki suatu pemerintah daerah dalam menyusun, mengelola, dan melaksanakan segala kebutuhan daerah seperti membentuk peraturan daerah dan menciptakan kebijakan dalam mengelola keuangan daerah terkait (Sujarweni, 2015).

Pengelolaan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas tujuan yang akan dan telah direncanakan. Pemerintah daerah merupakan subjek pengelola dana masyarakat harus mampu menjelaskan informasi keuangan yang dibutuhkan secara relevan, tepat waktu, akurat, dan dapat dipercaya untuk

kemudian digunakan dalam pengambilan keputusan lain. Pengelolaan keuangan adalah salah satu indikator utama pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan atau penyelenggaraan kebutuhan daerah yang dapat ditinjau keberhasilannya. Melihat pentingnya hal tersebut sehingga dibutuhkan adanya pengukuran kinerja atas segala aktivitas yang dilakukan pemerintah daerah.

Kinerja menurut Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2019 menyatakan bahwa kinerja merupakan wujud hasil atas segala kegiatan atau program yang direncanakan atau telah dicapai berkaitan dengan pemanfaatan anggaran dengan adanya pengukuran dalam aspek kuantitas dan kualitas. Pengukuran kinerja berfungsi sebagai alat evaluasi program, termasuk sebagai wadah perbandingan atas penyelenggaraan layanan yang akan dibuat dan telah dilakukan, dan sebagai media komunikasi terhadap masyarakat (Saraswati *et al.*, 2019). Maka dari itu untuk menganalisis bagaimana suatu pemerintah daerah melaksanakan pengelolaan keuangan dengan baik dapat ditinjau dari kinerja keuangan pemerintah terkait.

Pengukuran kinerja pada pemerintah daerah yang sebelumnya dipandang hanya sebagai sarana unjuk prestasi atas ketercapaian program dan kinerja yang baik, ternyata terdapat aspek lain yang ingin dicapai selain hal tersebut yaitu memperoleh kekuasaan legitimasi politik dan institusional. Kondisi tersebut linear dengan teori *institutional isomorphism* yang menyatakan bahwa organisasi tidak hanya bersaing untuk sumber daya serta pelanggan, namun juga untuk

institusional dan kekuasaan legitimasi politik guna menjaga keseimbangan sosial dan ekonomi (Sofyani *et al.*, 2015).

Ukuran pemerintah daerah merupakan salah satu faktor yang memiliki peranan dalam mewujudkan serta meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah, yang dapat ditinjau dari berapa ukuran pemerintah daerah tersebut. Pemerintah daerah yang memiliki ukuran pemerintah daerah yang besar memiliki kesempatan yang lebih mudah dalam menjalankan kegiatan pemerintah dan kegiatan operasional sehingga secara tidak langsung mendorong suatu pemerintah daerah terkait untuk memiliki atau meningkatkan kinerja keuangan yang baik. Ukuran pemerintah daerah merupakan salah satu indikator dalam besar atau kecilnya suatu pemerintah daerah yang dapat diukur melalui jumlah aset, kuantitas pegawai, produktivitas, dan besarnya pendapatan (Ridho, 2021). Maka dari itu, ukuran pemerintah daerah yang besar dengan pengelolaannya yang baik oleh pemerintah daerah terkait memiliki potensi untuk menghasilkan pendapatan asli daerah yang terus mengalami peningkatan (Mulyani *et al.*, 2017).

Keleluasaan pemerintah daerah dalam otonomi daerah merupakan upaya mengembangkan potensi daerah dalam rangka pembangunan ekonomi daerahnya di berbagai sektor, diantaranya pengembangan pada sektor ekonomi dan sarana prasarana. Pembangunan pada sektor sarana dan prasarana adalah upaya pemerintah daerah yang berkesinambungan dalam memberikan dampak positif pada sektor lainnya seperti membantu dalam mempercepat pertumbuhan

ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang baik mendorong terwujudnya kesejahteraan publik atau masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi pada sebuah daerah dapat ditinjau melalui nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang memuat seluruh nilai unit usaha dalam suatu periode. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan bagaimana suatu kegiatan ekonomi menghasilkan nilai yang positif atau nilai yang negatif. Kegiatan ekonomi yang bernilai positif menunjukkan adanya peningkatan dalam seluruh kegiatan ekonomi dalam periode tertentu, dalam sisi lain ketika pertumbuhan menunjukkan nilai yang negatif artinya dalam periode perekonomian tersebut sedang mengalami penurunan. Pengukuran kondisi ekonomi dalam suatu negara dalam diukur menggunakan data Produk Domestik Bruto (PDB).

Pertumbuhan ekonomi memanfaatkan berbagai faktor pendukung seperti melimpahnya sumber daya alam dengan mengolaborasikan peran teknologi yang membantu dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat dengan potensi sumber daya alam yang ada sepatutnya mendorong pemerintah daerah dalam menunjukkan kinerja pemerintah daerah yang baik.

Kinerja pemerintah daerah tidak terlepas atas peranan seorang kepala daerah dan sifat kepemimpinannya. Kepemimpinan memiliki pengaruh yang sangat kuat karena karakter pemimpin dipandang mampu mempengaruhi roda

pemerintahan (Mahardini, 2014). Pada penelitian *Upper echelon* mengungkapkan bahwa pengalaman direktur utama, nilai, dan kepribadian memiliki pengaruh terhadap visi, perspektif selektif, interpretasi, pilihan strategi yang berakhir pada adanya pengaruh terhadap kinerja perusahaan. Proses berjalannya roda pemerintahan, seorang kepala daerah harus memiliki karakteristik untuk terwujudnya perubahan daerah ke arah yang lebih baik. Seorang kepala daerah dituntut atau harus memiliki kemampuan dalam mengembangkan serta mengelola segala sumber daya daerah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta mewujudkan masyarakat yang sejahtera (Ridho, 2021). Kemampuan kepala daerah menunjukkan pengelolaan suatu daerah yang berdasar kepada karakteristik kepala daerah tersebut diantaranya tingkat pendidikan dan umur kepala daerah.

Tingkat pendidikan kepala daerah merupakan tingkatan pendidikan formal terakhir yang telah ditempuh atau dicapai oleh kepala daerah. Tingkat pendidikan kepala daerah memberikan pandangan atas pengetahuan dan kemampuan dasar seorang kepala daerah yang mempengaruhi setiap pengambilan keputusan yang bersifat strategis (Ridho, 2021). Kepala daerah diindikasikan sama dengan seorang manajer, dimana dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi memiliki tingkat kepekaan atas perkembangan dalam bidang aktivitas organisasi yang lebih baik (Noer, 2014).

Indonesia mengalami penambahan pemerintah daerah yang terus meningkat. Pemerintah daerah yang telah dibentuk memiliki umur administratif atau umur pemerintah secara resmi diakui negara yang beragam. Umur pemerintah daerah mengindikasikan bagaimana tingkat profesionalitas yang lebih tinggi pada pemerintahan daerah terkait dalam hal kinerja keuangan pemerintah daerah. Tidak sedikit pemerintah daerah yang terus berupaya meningkatkan kinerjanya dalam setiap periode yang berbeda. Penelitian yang dilakukan oleh Fitriyah (2016) menyatakan bahwa umur pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah. Terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri (2014) yang menyatakan bahwa umur administratif pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah

Penelitian ini terdapat perbedaan dengan penelitian-penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya dengan topik yang hampir serupa. Penelitian ini menggunakan beberapa jenis variabel serta adanya variabel baru dengan data yang berbeda diikuti penggunaan teori dasar yang berbeda. Pada penelitian ini digunakan teori Isomorfisme Institusional (*Isomorphism Institutional*) yang merupakan bentuk turunan dari teori Institusional. Isomorfisme Institusional memiliki tiga tipe dengan karakteristik berbeda yaitu Isomorfisme Koersif, Isomorfisme Memetik, dan Isomorfisme Normatif. Penelitian ini lebih menekankan pada implementasi Isomorfisme Koersif dan Isomorfisme Normatif.

Pertumbuhan Ekonomi, Ukuran Pemerintah, Tingkat Pendidikan Kepala Daerah, dan Umur Pemerintah Daerah dapat menjadi tekanan maupun menjadi faktor yang mendorong pemerintah daerah untuk terus bekerja secara maksimal dan menunjukkan kinerja yang baik khususnya dalam hal pengelolaan keuangan. Berdasarkan uraian dan penjelasan latar belakang di atas, maka judul penelitian ini adalah **“Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Ukuran Pemerintah, Tingkat Pendidikan Kepala Daerah, dan Umur Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah di Indonesia”** pada setiap Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang ada di Indonesia.

## 1.2 Rumusan Masalah

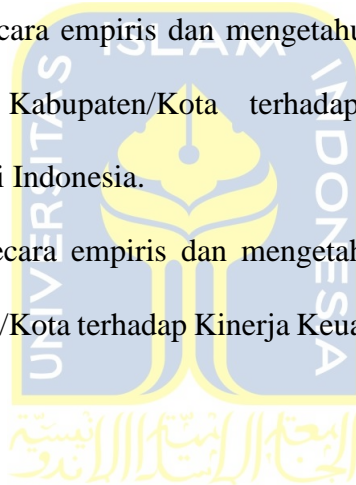
Berdasarkan latar belakang yang terjadi diatas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia.
2. Bagaimana pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia.
3. Bagaimana pengaruh Tingkat Pendidikan Kepala Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia.
4. Bagaimana pengaruh Umur Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia.

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji secara empiris dan mengetahui pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia.
2. Untuk menguji secara empiris dan mengetahui pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia.
3. Untuk menguji secara empiris dan mengetahui pengaruh Tingkat Pendidikan Kepala Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia.
4. Untuk menguji secara empiris dan mengetahui pengaruh Umur Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia.



### 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan atas dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti dan pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan mengenai penerapan ilmu akuntansi pada sektor publik khususnya pada kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia dan wawasan peneliti dan pembaca dalam mengkaji penelitian selanjutnya.



## 2. Bagi mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi contoh atau pedoman dan pembelajaran serta referensi bagi mahasiswa yang membutuhkan dalam melakukan penelitiannya.

## 3. Bagi pemerintah daerah

Pada hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah untuk dijadikan suatu saran atau informasi berguna untuk meningkatkan kinerja keuangan daerah di Indonesia.

### 1.5 Sistematika Penulisan

Pada penelitian ini, penulisan memuat susunan bab yang sistematis.

Berikut penjelasan susunan pada setiap bab:

#### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini memuat dan menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II: LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini memuat dan menjelaskan mengenai landasan teori yang digunakan pada penelitian ini, referensi penelitian terdahulu, hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini, dan kerangka penelitian.

### **BAB III: METODE PENELITIAN**

Bab ini memuat dan menjelaskan mengenai penentuan populasi dan sampel, metode pengumpulan data, analisis data yang akan dilakukan, variabel penelitian yang digunakan serta teknik analisis data.

### **BAB IV: ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

Bab ini memuat dan menjelaskan mengenai hasil atas analisis data, berikut dengan temuan empiris, hasil pengujian hipotesis, dan hasil penelitian.

### **BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini memuat dan menjelaskan mengenai kesimpulan atas penelitian, keterbatasan dalam melakukan penelitian, dan saran-saran yang berkaitan dengan kesimpulan atas penelitian ini serta untuk penelitian selanjutnya.



## BAB II

### LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Landasan Teori

##### 2.1.1 Teori institusional

Menurut Meyer dan Rowan, *Institutional Theory* (Teori Kelembagaan) didasarkan pada sebuah gagasan yang menegaskan bahwa suatu organisasi harus mampu memberikan keyakinan terhadap masyarakat atau publik tentang definisi suatu organisasi yang merupakan sebuah entitas yang legal (sah) dan layak atau dapat diterima untuk mendapatkan dukungan dengan tujuan sebagai upaya menjaga eksistensi organisasi (Romandiyah, 2018). Berdasarkan teori kelembagaan (*institutional theory*), organisasi yang menetapkan skala prioritas pada legitimasi cenderung mampu dalam menyesuaikan diri terhadap harapan sosial atau harapan yang bersifat eksternal berdasarkan kedudukan organisasi tersebut. Teori institusional berfokus pada aspek struktur sosial yang bersifat lebih dalam dan fleksibel dalam mengkaji proses dimana struktur, termasuk perencanaan, aturan, norma, serta rutinitas menjadi pedoman otoritatif dalam perilaku sosial (Scoot, 2004).

##### 2.1.1.1 Isomorfisme institusional

Isomorfisme menurut DiMaggio dan Powell (1983) adalah sebuah fenomena yang mendorong serta memaksa suatu organisasi untuk

menjalankan proses menyesuaikan diri dalam suatu organisasi atas lingkungan institusionalnya seperti tekanan peraturan hukum atau politik serta perilaku yang timbul atas ketidakpastian organisasi. Menurut Hawley (1968) isomorfisme adalah proses dorongan terhadap suatu unit dalam sebuah populasi untuk menghadapi kondisi dalam lingkungan yang serupa dengan cara menyerupai unit yang lainnya yang bersifat memaksa. Terdapat dua jenis isomorfisme, yakni (1) *Competitive Isomorphism* (Isomorfisme Kompetitif), yaitu pandangan atau asumsi rasionalitas atas sistem yang lebih menekankan pada persaingan pasar, perubahan yang bersifat spesifik, serta ukuran kesesuaian. Pandangan mengenai hal tersebut dinilai relevan dalam bidang-bidang yang terdapat persaingan bebas dan terbuka; dan (2) *Institutional Isomorphism* (Isomorfisme Institusional), yakni sebuah konsep yang berguna untuk memahami politik dan upacara yang melingkupi lebih banyak kehidupan modern, dimana suatu organisasi saling bersaing tidak hanya untuk mendapatkan sumber daya dan konsumen, melainkan untuk mendapatkan kekuasaan legitimasi politik dan institusional (DiMaggio & Powell, 1983).

Menurut DiMaggio & Powell (1983) membagi isomorfisme dalam 3 tipe yaitu: (1) Isomorfisme koersif (*Coercive isomorphic*) yang timbul karena pengaruh tekanan stakeholder terhadap organisasi tergantung sehingga organisasi merubah praktik institusinya, (2) Isomorfisme

memetik (*Mimetic isomorphic*) yang timbul karena adanya ketidakpastian lingkungan yang tinggi memungkinkan sebuah organisasi menyesuaikan diri dengan organisasi yang sejenis dengan panduan yang minim, (3) Isomorfisme normatif (*Normative Isomorphic*), berhubungan dengan tekanan yang timbul dari kelompok norma untuk mengadopsi praktik kelembagaan tertentu.

#### 2.1.2 Kinerja keuangan pemerintah

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Bab I Pasal 1 ayat 32, kinerja adalah bentuk dari hasil atau keluaran atas suatu program atau kegiatan yang telah direncanakan atau telah selesai dilaksanakan yang berkaitan dengan penggunaan anggaran berdasarkan kuantitas serta kualitas yang telah terukur. Definisi kinerja keuangan merujuk kepada Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 adalah segala bentuk hak maupun kewajiban daerah yang dapat berwujud uang dan/atau barang yang dapat memiliki hak milik daerah yang sehubungan dengan pelaksanaan atas hak maupun kewajiban itu.

Keuangan daerah berdasar ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 didefinisikan sebagai segala hak dan kewajiban daerah untuk menyelenggarakan pemerintah daerah yang memiliki

nilai baik berupa uang dan bentuk kekayaan yang dapat memiliki hak milik daerah menurut hak dan kewajiban daerah tersebut.

Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan bentuk pencapaian atau keberhasilan atas suatu kinerja atau pelaksanaan program dalam aspek penerimaan dan belanja daerah berdasarkan sistem keuangan yang telah ditentukan melalui suatu peraturan atau kebijakan perundang-undangan dalam periode anggaran. Untuk mengukur kinerja keuangan daerah secara akuntabilitas dapat dilakukan pengukuran menggunakan perhitungan rasio efektivitas dan efisiensi, rasio pertumbuhan, rasio kemandirian, dan rasio aktivitas (Sari I. P, 2016).

Rasio keuangan berfungsi sebagai indikator dan analisis kinerja keuangan atas suatu pemerintah daerah dimana dalam penelitian ini akan menggunakan rasio pertumbuhan untuk mengukur tingkat kinerja keuangan daerah. Menurut Mahmudi (2011) berikut fungsi analisis rasio keuangan adalah:

- a. Menganalisis tingkat kemandirian pengelolaan keuangan daerah dalam menggunakan anggaran untuk menyelenggarakan kebutuhan daerah.
- b. Menilai tingkat efisiensi dan efektivitas untuk merealisasikan pendapatan suatu daerah.
- c. Mengkaji aktivitas atau program pemerintah daerah dalam merealisasikan serta memanfaatkan sumber pendapatan daerahnya.

- d. Menilai kontribusi atas sumber pendapatan dalam menghasilkan suatu pendapatan daerah.
- e. Meninjau pertumbuhan atas penerimaan maupun pengeluaran dalam periode waktu tertentu.

### 2.1.3 Pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator dalam menentukan ketercapaian sebuah negara dengan berfokus pada kuantitas produksi suatu barang industri, perkembangan infrastruktur, perkembangan pendidikan, dan meningkatnya produksi atas barang modal dan peningkatan penyedia dan pengguna sektor jasa (Shabila, 2022). Pertumbuhan ekonomi juga didefinisikan sebagai proses peningkatan *output* atau keluaran per kapita dalam periode yang panjang (Boedino, 2013). Pertumbuhan ekonomi merujuk pada tingkat pertumbuhan *output* secara keseluruhan yang dapat diukur dengan tingkat pertumbuhan PDB atau Produk Domestik Bruto (Lipsey, 2008).

Perekonomian suatu negara mengalami pertumbuhan diindikasikan dengan pendapatan riil masyarakat yang mengalami peningkatan secara positif dari perbedaan tahun sebelum dan saat ini. Terdapat dua komponen untuk mengukur dan menilai pertumbuhan ekonomi yaitu, Produk Nasional Bruto (PNB) dan Produk Domestik Bruto (PDB). Faktor pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator dalam hal meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi yaitu faktor sumber daya manusia dan sumber daya alam (*resources*),

pembentukan modal, faktor sosial dan politik, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tingkat suku bunga serta tingkat inflasi. Menurut Sukirno (2019) terdapat empat hal yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah yaitu:

1. Keberadaan tanah serta kekayaan alam memberikan akses yang memudahkan dalam mengembangkan perekonomian negara.
2. Kuantitas dan kualitas penduduk atau tenaga kerja mendukung tingkat produktivitas yang lebih cepat.
3. Peran teknologi dan barang-barang modal dinilai sangat penting dalam mencapai pertumbuhan ekonomi.
4. Faktor sosial dan perilaku masyarakat dalam ikut serta membangun pertumbuhan ekonomi yang akan dicapai.

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang memiliki *multi effect* bagi perekonomian suatu negara yaitu meningkatkan pendapatan daerah yang mendorong aspek di bidang lain seperti investasi dan infrastruktur. Pertumbuhan ekonomi dapat dikategorikan sebagai tekanan isomorfisme koersif. Pertumbuhan ekonomi yang memiliki nilai positif mendorong atas peningkatan modal bagi pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan serta meningkatkan kinerja yang baik dengan meningkatkan nilai investasi dan pendapatan asli daerah.



#### 2.1.4 Ukuran pemerintah daerah

Menurut Kusumawardani dalam Ridho (2021) ukuran pemerintah daerah dapat merujuk pada besaran total aset, jumlah penduduk, dan luas wilayah. Jumlah aset dan pegawai serta tingkat produktivitas yang tinggi mampu menunjukkan tingkat kinerja keuangan daerah yang lebih baik (Patrick, 2007). Ukuran pemerintah daerah yang luas mendorong kegiatan operasional yang lebih mudah sehingga memiliki dampak dalam memberikan pelayanan publik yang lebih mudah dan memadai. Kegiatan pada bidang operasional yang semakin mudah mendorong peningkatan atas perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai bentuk tanggung jawab peningkatan kinerja. Ukuran pemerintah yang semakin besar mendorong upaya kegiatan operasional serta dengan diikuti nilai kinerja keuangan pemerintah daerah yang meningkat. Kondisi tersebut merupakan sebagai bentuk adanya tekanan yang besar atas suatu pengungkapan atas laporan keuangan terhadap pemerintah daerah dengan ukuran aset yang lebih besar.

Ukuran pemerintah daerah dapat dikatakan sebagai bentuk dari tekanan isomorfisme koersif karena ukuran pemerintah daerah yang besar dan luas mengindikasikan kekayaan daerah yang sama besar sehingga memicu pengawasan yang lebih ketat oleh masyarakat untuk menghindari bentuk penyelewengan atas pengelolaan keuangan daerah. Bentuk pengawasan

tersebut menimbulkan tekanan bagi pemerintah terhadap pengelolaan keuangan dan peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah.

#### 2.1.5 Tingkat pendidikan kepala daerah

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan merupakan upaya sadar serta terencana dalam rangka menciptakan suasana belajar dan proses belajar yang dilakukan secara aktif oleh peserta didik untuk meningkatkan potensi dan mengembangkan nilai spiritual, pengendalian individu, kepribadian, akhlak, kecerdasan, dan keterampilan yang berguna untuk diri, masyarakat, bangsa, dan negara.

Tingkat pendidikan kepala daerah adalah bentuk tingkatan pendidikan formal terakhir yang telah dicapai atau ditempuh oleh kepala daerah. Tingkat pendidikan kepala daerah memberikan pandangan atas pengetahuan dan kemampuan dasar seorang kepala daerah yang mempengaruhi setiap pengambilan keputusan yang bersifat strategis. Menurut Noer (2014) kepala daerah diindikasikan sama dengan seorang manajer, dimana dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi memiliki tingkat kepekaan atas perkembangan dalam bidang aktivitas organisasi yang lebih baik. Pendidikan tinggi pada seorang direktur memiliki pemikiran yang lebih luas dan terbuka serta

memiliki kemampuan yang baik dalam mengelola informasi dan mampu beradaptasi dengan baik dalam setiap perubahan (Hambrick & Mason, 1984).

Tingkat pendidikan kepala daerah adalah bentuk dari tekanan isomorfisme normatif. Tingkat pendidikan yang tinggi mendorong seorang kepala daerah untuk memiliki kemampuan serta kinerja yang lebih baik. Menurut Prayitno dalam Ridho (2021) seorang Eksekutif dengan tingkat pendidikan yang tinggi cenderung memiliki kognitif yang ternilai lebih kompleks. Hal tersebut mendorong kepala daerah menciptakan inovasi melalui ide-ide baru yang dimilikinya. Pencapaian dalam tingkat pendidikan didukung faktor seperti kemampuan dalam mengolah informasi, kemampuan dalam menerima inovasi serta kemampuan kognitif itu sendiri. Kepala daerah dengan kemampuan tersebut diharapkan mampu memberikan tanggung jawab melalui kinerja keuangan yang baik.

#### 2.1.6 Umur pemerintah daerah

Umur pemerintah daerah secara administratif merupakan umur suatu pemerintah daerah yang terhitung berdasarkan peraturan atau undang-undang terkait dibentuk (Budiarto & Indarti, 2019). Sebuah pemerintah daerah yang memiliki umur administratif lebih lama mengindikasikan memiliki pengalaman dan tingkat profesionalitas yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Sejalan dengan *Upper echelons theory*

menyatakan bahwa umur seorang manajer secara positif berkaitan dengan tingkat kecenderungan dalam mengelola informasi untuk setiap keputusan yang diambil (Hambrick & Mason, 1984). Umur pemerintah daerah mendorong munculnya tekanan normatif dimana dengan umur pemerintah daerah yang lebih lama cenderung harus memiliki nilai kinerja keuangan pemerintah daerah yang lebih baik.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

No.	Nama peneliti dan tahun	Variabel penelitian	Hasil penelitian
1.	Heryanti, Wahidahwati, dan Suryono (2019)	<p><b>Variabel dependen:</b> Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.</p> <p><b>Variabel independen:</b> PAD (Pendapatan Asli Daerah), pertumbuhan ekonomi, dana perimbangan.</p>	<p>PAD berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dana perimbangan berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh</p>

			secara signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
2.	Martantri (2019)	<p><b>Variabel dependen:</b> Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.</p> <p><b>Variabel independen:</b> PAD, pertumbuhan ekonomi, <i>leverage</i>, dana perimbangan.</p>	<p>PAD, pertumbuhan ekonomi, <i>leverage</i> tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.</p> <p>Dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.</p>
3.	Sari dan Mustanda (2019)	<p><b>Variabel dependen:</b> Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.</p> <p><b>Variabel independen:</b> Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan</p>	<p>Ukuran pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap kinerja Keuangan pemerintah daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan belanja modal</p>

		Asli Daerah (PAD), Belanja Modal.	berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
4.	Alvini (2018)	<b>Variabel dependen:</b> Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.  <b>Variabel independen:</b> Ukuran Pemerintah Daerah, Tingkat Kekayaan Daerah, Tingkat Ketergantungan Daerah Kepada Pemerintah Pusat, Belanja Modal.	Ukuran pemerintah daerah, Belanja modal, tingkat kekayaan pemerintah daerah memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kinerja Keuangan pemerintah. Tingkat ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

5.	Tama (2018)	<p><b>Variabel dependen:</b> Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.</p> <p><b>Variabel independen:</b> Karakteristik Kepala Daerah, Ukuran Pemerintah, Temuan audit.</p>	<p>Karakteristik kepala daerah dengan variabel masa kerja berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Variabel umur dan Pendidikan tidak memiliki pengaruh signifikan.</p> <p>Ukuran pemerintah tidak berpengaruh terhadap kinerja Keuangan pemerintah daerah.</p> <p>Temuan audit memiliki pengaruh negatif secara signifikan terhadap kinerja Keuangan pemerintah daerah.</p>
----	-------------	---	---

6.	Nasution dan Panggabean (2017)	<p><b>Variabel dependen:</b> Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.</p> <p><b>Variabel independen:</b> PAD, Pertumbuhan Ekonomi.</p>	<p>PAD dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.</p>
7.	Fitriyah (2016)	<p><b>Variabel dependen:</b> Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.</p> <p><b>Variabel independen:</b> Belanja daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Leverage, Status Daerah, Umur Pemerintah Daerah</p>	<p>Belanja daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Leverage, Status Daerah, Umur Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah.</p>
8.	Sari (2016)	<p><b>Variabel dependen:</b> Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.</p>	<p>Ukuran pemerintah daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan dana perimbangan</p>



		<p><b>Variabel independen:</b> PAD, ukuran pemerintah daerah, <i>leverage</i>, dana perimbangan, ukuran legislatif.</p>	<p>berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Untuk <i>leverage</i> dan ukuran legislatif tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.</p>
9.	Marhawai (2015)	<p><b>Variabel dependen:</b> Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.</p> <p><b>Variabel independen:</b> kemakmuran, ukuran pemerintah daerah, <i>intergovernmental revenue</i>, ukuran legislatif.</p>	<p>Kemakmuran, ukuran pemerintah daerah, <i>intergovernmental revenue</i>, dan ukuran legislatif berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.</p>
10.	Mahardini (2014)	<p><b>Variabel dependen:</b> Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.</p>	<p>Tingkat Pendidikan memiliki pengaruh positif terhadap kinerja</p>

		<p><b>Variabel independen:</b></p> <p>Karakteristik Kepala Daerah (Latar Belakang Pendidikan, Tingkat Pendidikan, Masa Jabatan)</p>	<p>keuangan pemerintah daerah.</p> <p>Latar Belakang Pendidikan dan Masa Jabatan tidak memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.</p>
11.	Putri (2014)	<p><b>Variabel dependen:</b></p> <p>Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.</p> <p><b>Variabel independen:</b></p> <p>Ukuran Pemerintah Daerah, Umur Administratif Pemerintah daerah, <i>Intergovernmental Revenue.</i></p>	<p>Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Umur Administratif Pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja Keuangan pemerintah. <i>Intergovernmental Revenue</i> berpengaruh negative terhadap kinerja</p>

			Keuangan pemerintah daerah.
--	--	--	-----------------------------

## 2.3 Hipotesis Penelitian

### 2.3.1 Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

Pertumbuhan ekonomi merupakan bentuk perubahan dalam bidang ekonomi yang merujuk pada berbagai faktor di masyarakat, salah satunya karena meningkatnya pelayanan jasa atau produksi barang. Menurut Martantri (2019) pertumbuhan ekonomi mengungkapkan besaran atas kegiatan perekonomian yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi menyatakan ukuran prestasi atas perkembangan ekonomi dalam periode yang lalu dengan periode saat ini.

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan proses pembangunan yang bersifat berkelanjutan. Pertumbuhan yang bernilai positif mampu mendorong kegiatan atau aktivitas lainnya seperti aktivitas investasi pada suatu daerah yang mendorong pembangunan infrastruktur daerah (Deprianto *et.al.*, 2013). Kondisi tersebut membantu suatu daerah meningkatkan pendapatan asli daerah yang akan terus mendorong sektor lain sehingga terwujudnya kinerja pemerintah daerah yang berkembang. Berdasarkan teori isomorfisme koersif, pertumbuhan ekonomi cenderung memaksa pemerintah daerah untuk bertanggungjawab atas kinerja keuangan daerah supaya menjadi lebih baik.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Nasution dan Raharja (2017) berkaitan dengan pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kinerja keuangan menyatakan terdapat pengaruh positif diantara kedua variabel tersebut. Berdasarkan penjelasan tersebut, pada penelitian ini diajukan hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>1</sub>: Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

### 2.3.2 Pengaruh ukuran pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

Ukuran pemerintah daerah dapat ditinjau dari total aset suatu daerah atau luas daerah berikut dengan jumlah penduduk daerah tersebut. Ukuran pemerintah daerah yang besar mendorong aktivitas operasional semakin mudah serta membantu kegiatan layanan masyarakat yang mencukupi (Kusumawardani, 2012). Aktivitas operasional yang berjalan baik membantu meningkatkan penerimaan atau Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut.

Pandangan masyarakat atas suatu pemerintahan daerah akan memberikan tekanan terhadap pemerintah dalam bertanggungjawab atas kewajibannya, dimana tekanan tersebut memiliki dampak terhadap tuntutan kinerja yang semakin baik dari pemerintah daerah (Sumarjo, 2010). Ukuran pemerintah daerah mengundang perhatian publik untuk melakukan

pengawasan atas pengelolaan aset dalam pemerintah daerah sehingga mendorong munculnya tekanan koersif terhadap pemerintah daerah untuk bertanggungjawab atas kinerja keuangannya. Sejalan dengan pengertian tekanan *coercive isomorphism* dimana teori ini menjelaskan tekanan dari para *stakeholder* yang memaksa suatu organisasi merubah praktik institusinya.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Sari (2016), Kusumawardani (2012), Aulia dan Rahmawaty (2020) menyatakan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan penjelasan tersebut, pada penelitian ini diajukan hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>2</sub>: Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

2.3.3 Pengaruh tingkat pendidikan kepala daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

Tingkat pendidikan kepala daerah mengindikasikan bagaimana seorang kepala daerah memberikan kebijakan atau keputusan yang strategis (Noer, 2014). Tingkat pendidikan kepala daerah merupakan ukuran pendidikan formal terakhir yang ditempuh oleh kepala daerah.

Pendidikan mencerminkan kredibilitas atau rasa percaya diri seorang kepala daerah dalam membangun jembatan komunikasi untuk mendorong pemanfaatan sumber daya daerah sehingga meningkatkan kinerja pemerintah

daerah (Beccera, 2014). Tingkat pendidikan tergolong dalam isomorfisme normatif yang menunjukkan dimana proses pendidikan serta pelatihan teknis berdampak terhadap kinerja organisasi dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sorang Eksekutif dengan tingkat pendidikan yang tinggi memiliki kognitif yang ternilai lebih Komplek (Prayitno, 2012). Tingkat pendidikan kepala daerah adalah bentuk dari tekanan isomorfisme normatif karena dengan pendidikan yang lebih tinggi mendorong seseorang memiliki sikap yang profesional.

Menurut penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Mahardini (2014) mengungkapkan tingkat pendidikan kepala daerah memiliki pengaruh secara positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan penjelasan tersebut, pada penelitian ini diajukan hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>3</sub>: Tingkat Pendidikan Kepala Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

2.3.4 Pengaruh umur pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

Umur pemerintah daerah secara administratif merupakan umur suatu pemerintah daerah yang dihitung menurut peraturan atau undang-undang terkait dibentuk. Sebuah pemerintah daerah dengan umur administratif lebih lama mengindikasikan memiliki pengalaman dan tingkat profesionalitas yang

lebih baik dalam meningkatkan kinerja keuangan pemrerintah daerah. Pemerintah daerah dengan umur yang lebih lama cenderung memiliki pengalaman dan kemampuan yang lebih sebagai bekal dalam proses evaluasi pada akhir periode. Melalui proses tersebut mampu menciptakan perubahan yang berimbas pada peningkatkan kinerja yang lebih baik.

Dintinjau melalui teori institusional, dalam hal ini pemerintah daerah memperoleh tekanan normatif yang dapat mempengaruhi kinerja pemerintah yang berujung pada terdapatnya perubahan organisasi bagian internal. Umur pemerintah yang lebih lama mendorong tekanan normatif yang lebih besar dalam meningkatkan kinerja keuangannya dalam periode selanjutnya.

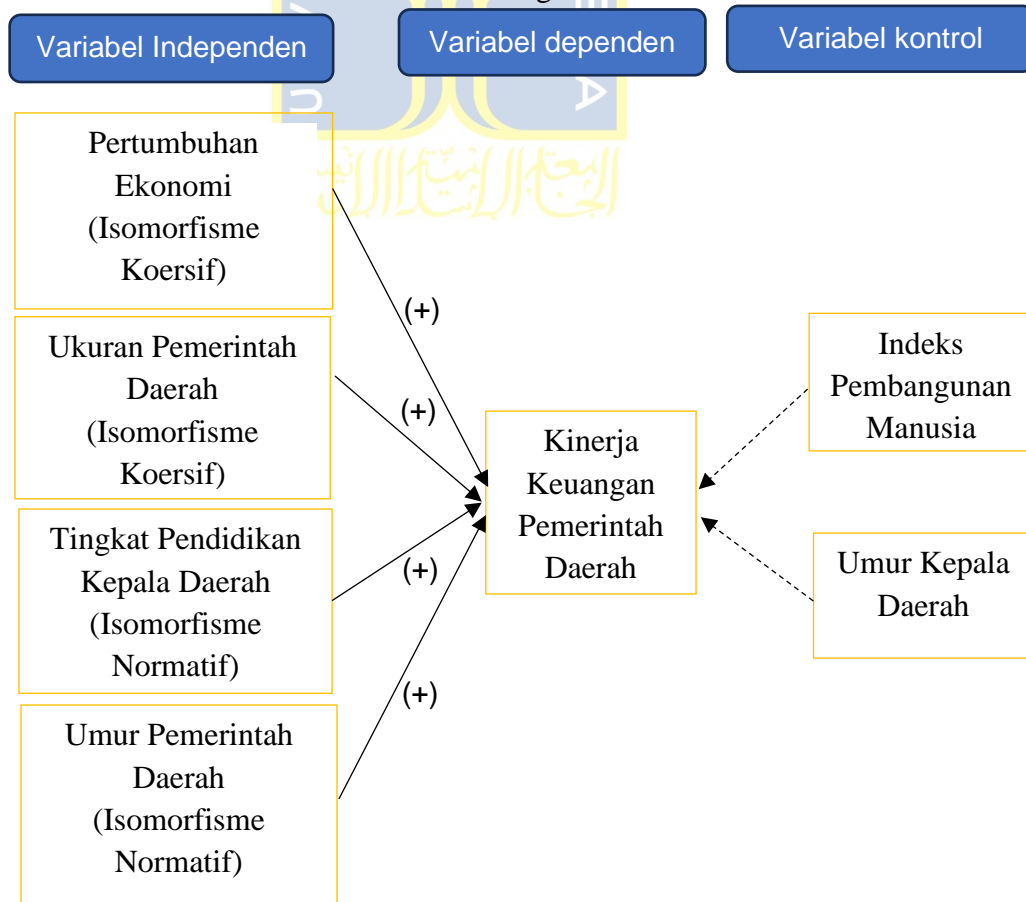
Penelitian yang dilakukan oleh Putri (2014) yang menyatakan bahwa umur administratif pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah. Terdapat perbedaan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fitriyah (2016) menyatakan bahwa umur pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah. Berdasarkan penjelasan tersebut, pada penelitian ini diajukan hipotesis sebagai berikut:

**H4: Umur pemerintah daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

## 2.4 Kerangka Penelitian

Penelitian ini menggunakan teori isomorfisme institusional untuk memproyeksi bagaimana kinerja keuangan suatu pemerintah daerah di Indonesia. Terdapat tiga bentuk rinci dalam teori *institutional isomorphism* yaitu isomorfisme koersif, isomorfisme memetik, dan isomorfisme normatif, yang pada penelitian ini hanya menggunakan dua yaitu isomorfisme koersif dan isomorfisme normatif. Tekanan isomorfisme koersif pada penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi dan ukuran pemerintah daerah, sedangkan pada tekanan isomorfisme normatif yaitu tingkat pendidikan kepala daerah serta umur pemerintah daerah. Model pada penelitian ini ditunjukkan pada gambar 2.1 berikut.

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian





## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Populasi dan Sampel**

##### **3.1.1 Populasi**

Menurut Sekaran & Bougie (2016 ) populasi mengindikasikan kepada keseluruhan dalam sekelompok orang atau dalam peristiwa atau kejadian yang kemudian menjadi fokus penelitian untuk melakukan penelitian. Populasi dalam penelitian ini yaitu Pemerintah Daerah berikut Bupati/Walikota dan/atau Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) yang berada pada setiap kabupaten/kota di Indonesia pada tahun 2018. Melalui data Kementerian Dalam Negeri Indonesia tahun 2020 total populasi kabupaten/kota dari 34 provinsi di Indonesia adalah sebanyak 514 kabupaten/kota. Pada penelitian ini peneliti menggunakan tahun penelitian tahun 2018 karena berdasarkan kondisi pemerintah daerah dalam hal hanya beberapa wilayah kabupaten dan kota yang sedang melakukan pemilihan tidak seperti pemilihan umum serentak pada bulan Februari 2017, sehingga terjadinya perbedaan pemangku jabatan dan pengelolaan keuangan.

##### **3.1.2 Sampel**

Sampel merupakan bagian terbatas atas populasi statistik yang dapat dipelajari untuk mendapatkan informasi secara keseluruhan (Webster, 1985).

Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dimana peneliti mengandalkan penilaiannya sendiri untuk memilih anggota populasi untuk berpartisipasi dalam penelitian. Karakteristik penilaian sampel yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah di audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.
2. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang menyajikan informasi melalui Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2018 yang dapat diakses oleh peneliti.
3. Informasi pemerintah daerah yang menyajikan keragaman atau karakteristik kepala daerah dan pemerintah daerah yang sedang menjabat tahun 2018 melalui website resmi atau sumber internet lainnya.

## **3.2 Sumber dan Metode Pengumpulan Data**

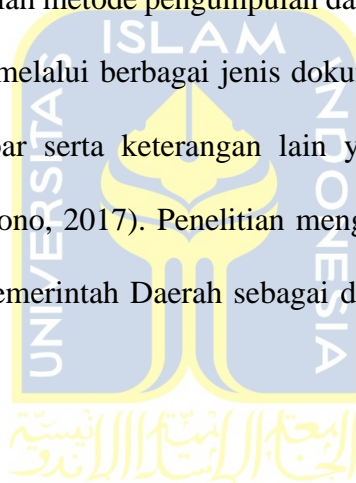
### **3.2.1 Sumber data**

Data dalam penelitian ini menggunakan jenis data sekunder. Data sekunder adalah jenis data yang bersumber dari media perantara atau pihak lain. Dalam penelitian ini data yang digunakan bersumber dari website resmi organisasi, instansi, atau pemerintah daerah, publikasi, sumber internet, dan Badan Pusat Statistik (BPS). Dokumen yang digunakan pada penelitian ini

meliputi Laporan Keuangan dan Non-Keuangan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota tahun 2018.

### 3.2.2 Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data berfungsi untuk memperoleh berbagai macam informasi yang dibutuhkan untuk memaksimalkan tujuan penelitian. Penelitian menggunakan metode dokumentasi dan berbagai sumber lainnya. Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dan informasi yang digunakan untuk penelitian melalui berbagai jenis dokumen, arsip, buku, termasuk data angka dan gambar serta keterangan lain yang dapat menjadi pendukung penelitian (Sugiyono, 2017). Penelitian menggunakan laporan keuangan dan Non-keuangan Pemerintah Daerah sebagai data yang akan digunakan dalam penelitian ini.



## 3.3 Definisi Operasional Variabel

### 3.3.1 Variabel dependen

Menurut (Sugiyono, 2017)) variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh sebab keberadaan variabel bebas atau karena sebab adanya variabel yang dipengaruhi. Variabel dependen (terikat) pada penelitian ini adalah kinerja keuangan pemerintah daerah.

### 3.3.1.1 Kinerja keuangan pemerintah daerah

Keberhasilan atau prestasi suatu pemerintah daerah adalah terwujudnya kinerja keuangan pemerintah daerah secara baik dengan berpedoman terhadap aturan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah. Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dapat diukur dengan merujuk pada rasio pertumbuhan keuangan daerah.

Rasio pertumbuhan keuangan daerah menggambarkan bagaimana pertumbuhan keuangan daerah dalam periode anggaran tersebut melalui kinerja keuangan APBD yang akan menunjukkan pertumbuhan negatif atau positif. Rumus untuk menghitung rasio pertumbuhan adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{PAD_{t1} - PAD_{t0}}{PAD_{t0}}$$

Keterangan:

$PAD_{t1}$  = Realisasi penerimaan PAD tahun saat ini (sekarang)

$PAD_{t0}$  = Realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya

### 3.3.2 Variabel Independen

Menurut Sugiyono (2017) variabel independen (bebas) adalah variabel yang mempengaruhi atau menyebabkan adanya variabel dependen (terikat). Variabel independen (bebas) pada penelitian ini meliputi pertumbuhan

ekonomi, ukuran pemerintah daerah, tingkat pendidikan kepala daerah, serta umur pemerintah daerah.

### 3.3.2.1 Pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang menunjukkan sebuah perkembangan dalam bidang perekonomian yang dapat dilihat dari peningkatan perdagangan, konsumsi rumah tangga, produksi barang dan jasa, dan investasi yang mendorong kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara diukur menggunakan Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB (Maimunah *et al.*, 2017). Menurut Raharja *et al.* (2017) PDRB mengindikasikan bentuk pertambahan nilai melalui kegiatan ekonomi secara menyeluruh dalam waktu dan wilayah tertentu. Dalam penelitian ini data pertumbuhan ekonomi menggunakan sumber Badan Pusat Statistik (BPS) yang telah terhitung. Perhitungan pertumbuhan ekonomi dirumuskan dalam persamaan sebagai berikut.

$$Gt = \frac{PDB(t) - PDB(t - 1)}{PDB(t - 1)} \times 100\%$$

Keterangan

Gt = Pertumbuhan ekonomi pada periode t (tahunan atau triwulan)

$PDB_t$  = Produk Domestik Bruto (PDB) periode t (berdasarkan harga konstan)

$PDB_{t-1}$  = Produk Domestik Bruto (PDB) periode sebelumnya

### 3.3.2.2 Ukuran pemerintah daerah

Ukuran pemerintah daerah merupakan tolak ukur atau variabel yang menunjukkan besar atau kecil suatu pemerintah daerah yang dapat dikukur dengan menggunakan total kekayaan (aset), kuantitas pegawai, besarnya total pendapatan serta tingkat sebuah produktivitas. Menurut Sumarjo dalam Ridho (2021) untuk mengukur ukuran pemerintah, penelitian ini akan menggunakan proyeksi total aset yang dilihat dari laporan neraca dalam suatu pemerintah daerah. Proyeksi total aset menjadi tolak ukur ukuran pemerintah daerah karena bersifat relatif konstan.

### 3.3.2.3 Tingkat pendidikan kepala daerah

Tingkat pendidikan atau jenjang pendidikan berdasarkan Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah tahapan atau tingkatan yang berdasarkan atas tingkat perkembangan peserta didik, tujuan, dan kemampuan yang akan dicapai dan dikembangkan. Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2020 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, syarat minimal pendidikan mencalonkan bupati dan/atau wali kota adalah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat. Pada penelitian ini tingkat pendidikan akan diklasifikasikan menjadi SLTA, Diploma (D1, D2, D3, D4), Strata 1 (S1), Strata 2 (S2), dan Strata 3 (S3)

SLTA : Disimbolkan dengan menggunakan angka 1

Diploma : Disimbolkan dengan menggunakan angka 2

S-1 : Disimbolkan dengan menggunakan angka 3

S-2 : Disimbolkan dengan menggunakan angka 4

S-3 : Disimbolkan dengan menggunakan angka 5

#### 3.3.2.4 Umur pemerintah daerah

Umur pemerintah daerah secara administratif merupakan umur suatu pemerintah daerah yang dihitung menurut peraturan atau undang-undang terkait dibentuk. Sebuah pemerintah daerah dengan umur administratif lebih lama mengindikasikan memiliki pengalaman dan tingkat profesionalitas yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah dengan umur yang lebih lama cenderung memiliki pengalaman dan kemampuan yang lebih sebagai bekal dalam proses evaluasi pada akhir periode. Pengukuran umur pemerintah daerah dilakukan dengan cara menghitung umur pemerintah

daerah terkait menurut umur administratifnya atau berdasarkan peraturan yang dibentuk.

### 3.3.3 Variabel kontrol

Variabel kontrol merupakan variabel yang dikendalikan sehingga variabel independen yang digunakan dalam penelitian terhadap variabel dependen tidak terpengaruh oleh faktor eksternal yang tidak diteliti sehingga mampu mencegah ditemukannya perhitungan yang bersifat bias dan memperoleh model empiris yang akurat dan lengkap. Variabel kontrol dalam penelitian ini adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan umur kepala daerah.

#### 3.3.3.1 Indeks pembangunan manusia

Indek Pembangunan Manusia atau IPM adalah kondisi yang menggambarkan bagaimana hasil pembangunan melalui tingkat pendapatan, pendidikan, kesehatan serta lainnya dalam mengukur tingkat keberhasilan dalam membangun kualitas hidup masyarakat. Terdapat tiga dimensi dasar dalam pembentukan IPM yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Pengukuran indeks pembangunan manusia akan dilakukan dengan meninjau nilai IPM yang berbeda pada setiap pemerintah daerah.



### 3.3.3.2 Umur kepala daerah

Umur kepala daerah merupakan tolak ukur atau variabel yang menunjukkan kemampuan, kematangan, dan kedewasaan seorang kepala daerah dalam pengambilan keputusan untuk meningkatkan kinerja keuangan yang baik. Untuk mengukur pengaruh umur kepala daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, penelitian ini akan berfokus pada perbedaan umur kepala daerah.

## 3.4 Metode Analisis Data

### 3.4.1 Statistik deskriptif

Menurut Ghozali (2018) statistik deskriptif yaitu teknik atau metode statistik yang dibutuhkan dan selanjutnya akan digunakan dalam rangka menggambarkan data yang telah dirangkum. Statistik deskriptif mempelajari sebuah data variabel yang difokuskan pada *mean* (nilai rata-rata), nilai minimum, nilai maksimum, dan standar deviasi.

### 3.4.2 Uji parsial (Uji T)

Uji parsial (uji T) dalam penelitian dapat menunjukkan ukuran atas pengaruh suatu variabel independen dalam menjelaskan variasi atas variabel dependen secara individual (Ghozali, 2018). Secara parsial variabel independen mempengaruhi secara signifikan atas variabel dependen dengan ketentuan nilai signifikansi  $< 0,05$ . Untuk nilai signifikansi  $> 0,05$  artinya

variabel independen tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap variabel dependen secara parsial.

### 3.4.3 Analisis koefisien determinasi

Analisis koefisien determinasi ( $R^2$ ) berfungsi untuk memberikan ukuran atau persentase atas total variabel dependen terhadap variabel dependen (Widarjono, 2018). Fungsi lain dari koefisien determinasi yaitu untuk mengukur bagaimana sebuah model regresi menerangkan variasi variabel dependen. Nilai dari koefisien determinasi adalah 0-1 atau  $0 < R^2 < 1$  yang artinya jika nilai  $R^2$  lebih mendekati nilai 0 mengindikasikan bahwa koefisien determinasi bernilai kecil sehingga dapat diartikan variabel independen terbatas dalam menjelaskan variabel dependen. Berbanding terbalik jika nilai  $R^2$  mendekati nilai 1 berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan sangat kuat dan seluruh informasi bersifat relevan atas variabel dependen.

### 3.4.4 Uji asumsi klasik

Menurut Ghozali (2018) uji asumsi klasik dilaksanakan sebelum adanya pengujian terhadap hipotesis melalui metode analisis linear berganda. Uji asumsi klasik dijalankan dalam rangka untuk menganalisis uji ketepatan terhadap konsistensi, estimasi serta ketidakbiasan atas suatu model regresi yang diusulkan dalam suatu penelitian.

#### 3.4.4.1 Uji normalitas

Uji normalitas (Ghozali, 2005) berfungsi untuk memperoleh hasil model regresi tersebut menunjukkan distribusi normal atau tidak. Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji statistik non para metrik yaitu *Kolmogrov Smirnov* dengan berfokus pada hasil sampel. Hasil yang menunjukkan koefisien 0,05 dan apabila nilai signifikansi menunjukkan nilai lebih dari 0,05 ( $>0,05$ ), dapat dikatakan bahwa data terdistribusi normal. Dan sebaliknya, jika nilai signifikansi tersebut menunjukkan nilai kurang dari 0,05 ( $<0,05$ ) artinya data tersebut tidak terdistribusi normal.

#### 3.4.4.2 Uji multikolinearitas

Uji multikolinearitas memiliki tujuan untuk mengetahui keterikatan diantara variabel independen (bebas) dimana pengujian ini menghasilkan pengujian yang baik apabila menghasilkan tidak terdapat hubungan antara variabel independen (Ghozali, 2018). Melalui program SPSS atau *Statistical Product and Service Solution* dapat membantu pengujian untuk menunjukkan ada atau tidaknya multikolinearitas dengan menggunakan nilai *Variance Inflation Factor* (VIP) atau nilai toleransi. Menurut Ghozali (2005) dalam pengujian ini dapat dilihat dengan berfokus pada nilai VIF yaitu, apabila nilai  $VIF > 10$  menunjukkan tidak terjadi multikolinearitas.

#### 3.4.4.3 Uji heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas berfungsi untuk menguji apakah model regresi mengalami peristiwa ketidaksamaan varians residual pada model regresi dari suatu pengamatan satu dengan pengamatan lainnya (Ghozali, 2018). Dalam pengujian ini apabila varians residual dari suatu pengamatan menunjukkan hal yang sama maka dapat dikatakan homokedastisitas. Dan sebaliknya, jika varians residual dalam suatu pengamatan menunjukkan perbedaan dikatakan sebagai heteroskedastisitas. Model regresi dalam suatu penelitian bernilai baik apabila terjadi homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas yaitu dengan pengujian yang menggunakan uji Glejser melalui program SPSS. Pada uji Glejser mengajukan untuk meregresi nilai absolut atas variabel terikat (independen) dimana jika hasil menunjukkan koefisien parameter beta lebih dari 0,05 ( $>0,05$ ) artinya tidak terdapat heteroskedastisitas.

#### 3.4.5 Analisis regresi linear berganda

Analisis regresi menurut Ghozali (2018) didefinisikan sebagai hubungan diantara variabel dependen dengan beberapa variabel independen yang memiliki tujuan untuk menghasilkan estimasi serta prediksi rata-rata (*mean*) atas suatu populasi atau diartikan diaman nilai suatu variabel dependen didasari oleh variabel independen lain. Analisis regresi linear berganda juga memiliki manfaat untuk mengukur dalam rangka memprediksi hubungan

kekuatan atau pengaruh atas variabel independen terhadap variabel dependen.

Persamaan analisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5IPM + b_6UKD + e$$

Keterangan:

Y = Kinerja keuangan pemerintah daerah

a = Nilai konstanta

$b_1, b_2, b_3, b_4, b_5, b_6$  = Koefisien regresi

$X_1$  = Pertumbuhan ekonomi

$X_2$  = Ukuran pemerintah daerah

$X_3$  = Tingkat pendidikan

$X_4$  = Umur pemerintah daerah

IPM = Indeks Pembangunan Manusia

UKD = Umur kepala daerah

e = Standar error

## **BAB IV**

### **DATA DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Deskripsi Objek Penelitian**

Penelitian ini menggunakan variabel terikat (dependen) berupa kinerja keuangan pemerintah daerah yang dianalisis dengan menggunakan rasio pertumbuhan keuangan daerah sebagai bentuk pengukurannya. Analisis juga dilakukan terhadap variabel independen yaitu pertumbuhan ekonomi, ukuran pemerintah daerah, tingkat pendidikan kepala daerah, dan umur kepala daerah.

Sampel yang digunakan pada penelitian ini berjumlah 125 sampel. Pada penelitian yang menggunakan analisis data multivariat seperti analisis regresi berganda, ukuran sampel penelitian harus memiliki ukuran sepuluh kali atas jumlah variabel yang digunakan (Roscoe, 1975). Proses pengumpulan data dilakukan dengan memperhatikan indikator sampel yang dibutuhkan sehingga terpilih sampel sebanyak 125 sampel. Sampel yang dipilih oleh peneliti merupakan data yang didapat dari data keuangan dan non keuangan Kabupaten dan Kota dimana pada setiap provinsi memiliki perwakilan secara random melalui Teknik *purposive sampling* dengan tetap memperhatikan indikator sampel yang harus terpenuhi. Data keuangan yang digunakan pada penelitian ini yaitu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada tahun 2018 yang telah di audit, dan untuk data non keuangan berupa tingkat pendidikan kepala daerah, umur pemerintah daerah, dan umur kepala daerah.

## 4.2 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif akan memaparkan ilustrasi suatu data melalui nilai minimum, nilai maksimum, nilai *mean* (rata-rata), dan standar deviasi. Tabel Statistik Deskriptif ditunjukkan pada tabel 4.1.

Tabel 4.1 **Statistik Deskriptif**

<b>Variabel Penelitian</b>	<b>n</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Mean</b>	<b>Standar Deviation</b>
Pertumbuhan Ekonomi	125	-4,08	8,26	5,2657	1,64281
Ukuran Pemerintah Daerah	125	836.536.014.765	20.358.502.058.443	3.365.444.923.685,51	2.840.153.787.786,408
Umur Pemerintah Daerah	125	10	76	38,62	23,443
Indeks Pembangunan Manusia	125	49,37	86,11	70,9263	6,32455
Umur Kepala Daerah	125	33	70	53,90	7,879
Kinerja Keuangan	125	-0,170	0,343	0,04049	0,081059

Sumber: Hasil olah data sekunder, 2023

Berdasarkan Tabel 4.1 di atas dapat disimpulkan bahwa nilai minimum pertumbuhan ekonomi sebesar -4,08% yang dimiliki oleh kota Bontang dan nilai maksimum sebesar 8,26% yang dimiliki kota Ternate. Nilai *mean* (rata-rata) pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2657% dengan nilai standar deviasi yaitu sebesar 1,64281%.

Nilai *mean* (rata-rata) pada ukuran pemerintah daerah adalah sebesar 3.365.444.923. 685,51 berikut dengan nilai standar deviasi sebesar 2.840.153.787.786,408. Nilai minimum pada ukuran pemerintah daerah dimiliki oleh kabupaten Lembata yaitu sebesar 836.536.014.765 dan nilai maksimum sebesar 20.358.502.058.443 yang dimiliki oleh kota Tangerang Selatan.

Pada uji ini menunjukkan umur pemerintah daerah yang menggunakan data nominal memiliki nilai minimum sebesar 10,00, nilai maksimum sebesar 76,00, dan nilai rata-rata sebesar 38,62 serta standar deviasi sebesar 23,443.

Pada uji ini menunjukkan indeks pembangunan manusia memiliki nilai minimum sebesar 49,37, nilai maksimum sebesar 86,11, dan nilai rata-rata sebesar 70,9263 serta standar deviasi sebesar 6,32455.

Pada umur kepala daerah nilai minimum sebesar 33 tahun yang dimiliki oleh Bupati kabupaten Gowa dan nilai maksimum sebesar 70 tahun yang dimiliki oleh Bupati kabupaten Gunungkidul. Nilai *mean* (rata-rata) pada umur kepala daerah sebesar 53,90 tahun dengan nilai standar deviasi yaitu sebesar 7,879 tahun.



Nilai *mean* pada kinerja keuangan pemerintah daerah yaitu sebesar 0,04049 dengan nilai standar deviasi adalah sebesar 0,081059. Nilai minimum pada kinerja keuangan pemerintah daerah dimiliki oleh kabupaten Maluku Barat Daya adalah sebesar -0,170 dan nilai maksimum sebesar 0,343 yang dimiliki oleh Kabupaten Paser.

Tabel 4.2 **Tingkat Pendidikan Kepala Daerah**

<b>Tingkat Pendidikan</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Percent</b>
SLTA	10	8
Diploma	0	0
S-1	37	29,2
S-2	59	47,2
S-3	19	15,2
<b>Total</b>	125	100

Sumber: Hasil olah data sekunder, 2023

Berdasarkan Tabel 4.2 dapat disimpulkan terdapat frekuensi paling tinggi pada tingkat atau jenjang pendidikan Strata 2 (S-2) yaitu sebesar 59 yang dimiliki oleh kepala daerah. Tingkat pendidikan yang ditempuh pada Strata 2 ini telah ditempuh beberapa kepala daerah kabupaten dan kota diantaranya kabupaten Banka Selatan, kabupaten Brebes, kabupaten Kaur, kabupaten Takalar, dan 55 kabupaten/kota lainnya. Tingkat Pendidikan dengan frekuensi terendah terdapat

pada jenjang Pendidikan diploma sebesar 0 mengikuti setelahnya yaitu jenjang Strata 3 sebesar 19 kepala daerah.

#### 4.3 Uji Parsial (Uji T)

Uji parsial (uji T) menunjukkan ukuran atas pengaruh suatu variabel independen untuk menjelaskan variasi mengenai variabel dependen secara individual (Ghozali, 2018). Secara parsial variabel independen mempengaruhi secara signifikan atas variabel dependen dengan ketentuan nilai signifikansi  $< 0,05$ . Untuk nilai signifikansi  $> 0,05$  artinya variabel independen tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap variabel dependen secara parsial. Pada tabel 4.3 menunjukkan hasil dari uji t.

Tabel 4.3 Uji T

<i>Model</i>	<i>Unstandardized Coefficients</i>		
	<b>B</b>	<b>T</b>	<b>Sig.</b>
<i>(Constant)</i>	0,057	0,578	0,564
Pertumbuhan Ekonomi (X1)	-0,007	-1,638	0,104
Ukuran Pemerintah Daerah (X2)	4,830E-15	1,715	0,089
Tingkat Pendidikan Kepala daerah (X3)	0,013	1,841	0,048
Umur Pemerintah Daerah (X4)	0,000	-1,523	0,130
Indeks Pembangunan Manusia (X5)	0,000	-0,386	0,700
Umur Kepala Daerah (X6)	0,000	0,214	0,831

Sumber: Hasil olah data sekunder, 2023

Berdasarkan pada Tabel 4.3, hasil uji parsial (uji t) dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Variabel pertumbuhan ekonomi memiliki nilai signifikansi adalah sebesar 0,104 yang artinya nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dan dapat disimpulkan  $H_1$  ditolak.
2. Variabel ukuran pemerintah daerah memiliki nilai signifikansi adalah sebesar 0,089 yang artinya nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dan dapat disimpulkan  $H_2$  ditolak.
3. Variabel tingkat pendidikan kepala daerah memiliki nilai signifikansi adalah sebesar 0,048 yang artinya nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat pendidikan kepala daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dan dapat disimpulkan  $H_3$  diterima.
4. Variabel umur pemerintah daerah memiliki nilai signifikansi adalah sebesar 0,130 yang artinya nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa umur kepala daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dan dapat disimpulkan  $H_4$  ditolak.

#### 4.4 Analisis Koefisien Determinasi

Fungsi dari koefisien determinasi yaitu untuk mengukur bagaimana sebuah model regresi menerangkan variasi variabel dependen. Pada tabel 4.4 menunjukkan hasil dari analisis koefisien determinasi.

Tabel 4.4 Analisis Koefisien Determinasi

<b>R</b>	<b>R Square</b>	<b>Adjusted R Square</b>
0,308	0,095	0,049

Sumber: Hasil olah data sekunder, 2023

Berdasarkan Tabel 4.4, diketahui nilai *Adjusted R Square* yaitu sebesar 0,049 atau 4,9%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi, ukuran pemerintah daerah, tingkat pendidikan kepala daerah, dan umur kepala daerah terdapat pengaruh kontribusi terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yaitu sebesar 4,9%. Nilai sisa sebesar 95,1% artinya terdapat variabel lain yang dapat mempengaruhi variabel dependen pada penelitian ini.

#### 4.5 Uji Asumsi Klasik

Penelitian akan dilakukan terlebih dahulu untuk menguji variabel menggunakan uji normalitas, uji multikolinearitas serta uji heteroskedastisitas sebelum dilakukan analisis linear berganda.

#### 4.5.1 Uji normalitas

Uji normalitas adalah uji untuk menentukan apakah data yang sedang digunakan berdistribusi normal pada penelitian ini (Ghozali, 2018). Pada penelitian ini menggunakan metode tes *One-Sample Kolmogrov-Smirnov* untuk melakukan uji normalitas. Hasil tes dari *One-Sample Kolmogrov-Smirnov* dengan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 artinya data dinyatakan berdistribusi normal. Hasil dari uji normalitas ditunjukkan pada tabel 4.5 dibawah ini.

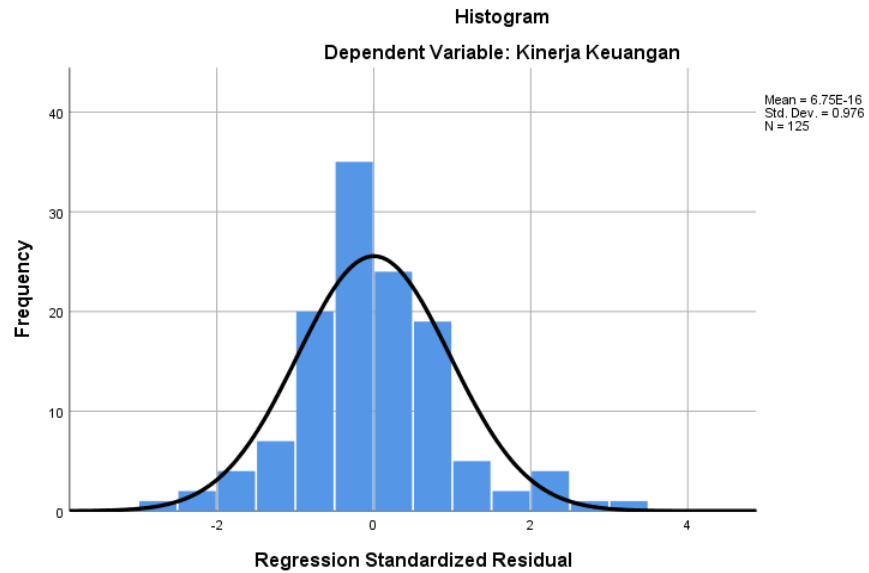
Tabel 4.5 Uji Normalitas *One-Sample Kolmogrov-Smirnov*

	<i>Unstandardized Residual</i>
n	125
Asymp Sig. (2-tailed)	0,200

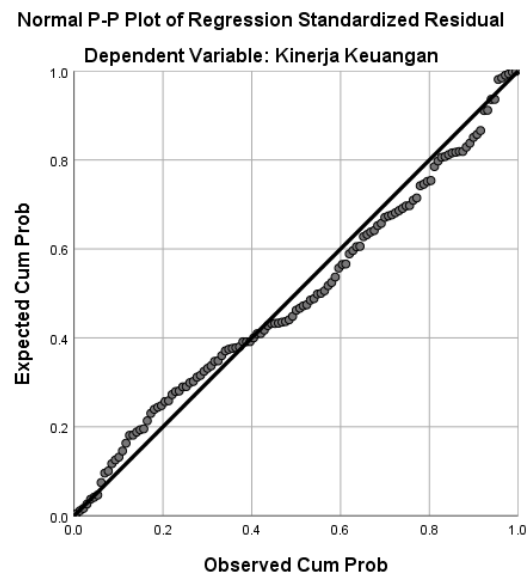
Sumber: Hasil olah data sekunder, 2023

Berdasarkan Tabel 4.5 di atas, diketahui nilai signifikansi tes *One-Sample Kolmogrov-Smirnov* adalah sebesar 0,200. Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05 yang memiliki arti bahwa data residual telah terdistribusi normal. Pada gambar 4.1 dan gambar 4.2 dibawah ini adalah gambar dari histogram dan p-p plot atas uji normalitas.

Gambar 4.1 Histogram Uji Normalitas



Gambar 4.2 P-P Plot Uji Normalitas



Pada Gambar 4.2 diatas menunjukkan adanya data yang menyebar jauh diantara garis diagonal serta linear dengan garis diagonal yang memiliki arti bahwa data tersebut memiliki pola distribusi yang normal dan layak digunakan serta dapat disimpulkan bahwa model regresi telah memenuhi asumsi normalitas dalam penelitian. Data yang telah terdistribusi normal dapat lebih diperkuat dengan melakukan uji normalitas pada *One-Sample Kolmogorov-Smirnov*.

#### 4.5.2 Uji multikolinearitas

Uji multikolinearitas memiliki tujuan untuk mengetahui adanya korelasi diantara variabel independen melalui model regresi (Ghozali, 2018). Hasil yang menyatakan tidak terdapat korelasi antar variabel memiliki arti bahwa model regresi dinilai baik (Ridho, 2021). Regresi yang bebas atas multikolinearitas ditunjukkan dengan nilai *tolerance* yang memiliki nilai lebih dari 0,1 dengan nilai VIF kurang dari 10. Pada tabel 4.6 dapat dilihat hasil dari uji multikolineritas.

Tabel 4.6 Uji Multikolinearitas

Varibel Penelitian	<i>Tolerance</i>	<i>VIF</i>
Pertumbuhan Ekonomi	0,976	1,024
Ukuran Pemerintah Daerah	0,788	1,269
Tingkat Pendidikan Kepala daerah	0,979	1,022
Umur Pemerintah Daerah	0,908	1,101
Indeks Pembangunan Manusia	0,800	1,249
Umur Kepala Daerah	0,922	1,084

Sumber: Hasil olah data sekunder, 2023

Berdasarkan Tabel 4.6 menunjukkan bahwa nilai *tolerance* dan *VIF* pada seluruh variabel memenuhi syarat dan ketentuan yaitu nilai *tolerance* yang lebih dari 0,1 dan nilai *VIF* kurang dari 10. Hasil dari uji multikolinearitas ini memiliki arti bahwa tidak terdapatnya korelasi atau hubungan antar semua variabel dengan model regresi yang bebas dari multikolinearitas. Kesimpulan atas uji ini menunjukkan layak untuk digunakan dalam penelitian ini.

#### 4.5.3 Uji heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas memiliki tujuan untuk menguji suatu model regresi memiliki perbedaan varian atas residual dalam pengamatan yang satu dengan pengamatan yang lainnya (Ghozali, 2018). Uji heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji glejser. Hasil dari nilai signifikansi



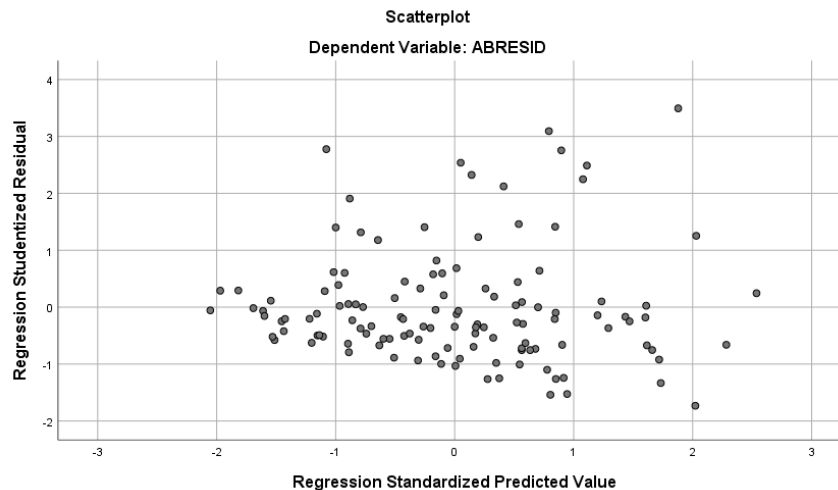
yang lebih dari 0,5 pada uji glejser artinya tidak terjadi heterokedastisitas. Pada tabel 4.8 dapat dilihat hasil dari uji heteroskedastisitas.

Tabel 4.7 Uji Heteroskedastisitas

Varibel Penelitian	Nilai Sig.
Pertumbuhan Ekonomi	0,131
Ukuran Pemerintah Daerah	0,584
Tingkat Pendidikan Kepala daerah	0,440
Umur Pemerintah daerah	0,059
Indeks Pembangunan Manusia	0,170
Umur Kepala Daerah	0,256

Sumber: Hasil olah data sekunder, 2023

Berdasarkan Tabel 4.7 dapat disimpulkan bahwa nilai signifikansi atas seluruh variabel independen melalui uji glejser ini menunjukkan nilai lebih dari 0,05. Hasil dari uji glejser tersebut mengungkapkan tidak terdapat atau terjadi heteroskedastisitas. Melalui gambar 4.3 menunjukkan hasil uji heteroskedastisitas dengan *scatterplot*.

Gambar 4. 3 Uji Heteroskedastisitas *Scatterplot*

Gambar 4.3 menunjukkan terdapat pola titik-titik yang tidak beraturan yang terletak diantara titi atas dan bawah nilai 0 pada sumbu Y. Keadaan tersebut dapat disimpulkan pada uji variabel tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

#### 4.6 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda memiliki fungsi untuk mengetahui seberapa besar pengaruh atas pertumbuhan ekonomi sebagai variabel  $X_1$ , ukuran pemerintah daerah sebagai variabel  $X_2$ , tingkat pendidikan kepala daerah sebagai variabel  $X_3$ , dan umur kepala daerah sebagai variabel  $X_4$  terhadap kinerja keuangan kepala daerah sebagai variabel  $Y$ . Persamaan regresinya adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5IPM + b_6UKD + e$$

Keterangan:

Y = Kinerja keuangan pemerintah daerah

a = Nilai konstanta

$b_1, b_2, b_3, b_4, b_5, b_6$  = Koefisien regresi

$X_1$  = Pertumbuhan ekonomi

$X_2$  = Ukuran pemerintah daerah

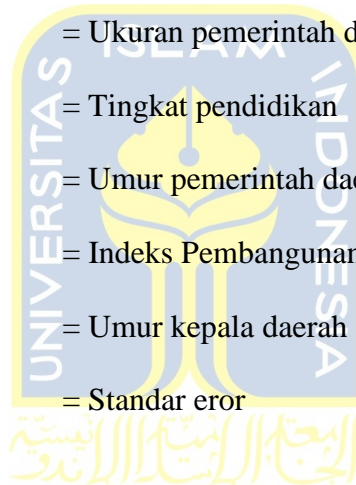
$X_3$  = Tingkat pendidikan

$X_4$  = Umur pemerintah daerah

IPM = Indeks Pembangunan Manusia

UKD = Umur kepala daerah

e = Standar error



Hasil dari analisis regresi linear berganda ditunjukkan oleh tabel 4.8.

Tabel 4.8 Analisis Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients			
	<i>B</i>	<i>Standard error</i>	<i>T</i>	<i>Sig.</i>
(Constant)	0,057	0,099	0,578	0,564
Pertumbuhan Ekonomi	-0,007	0,004	-1,638	0,104
Ukuran Pemerintah	0,00000000000000000483	0,000	1,715	0,089
Tingkat Pendidikan Kepala Daerah	0,013	0,007	1,841	0,048
Umur Pemerintah daerah	0,000	0,000	-1,523	0,130
Indeks Pembangunan Manusia	0,000	0,001	-0,386	0,700
Umur kepala Daerah	0,000	.001	0,214	0,831

Sumber: Hasil olah data sekunder, 2023

Berdasarkan hasil tabel 4.8 diatas, didapatkan persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = 0,057 + (-0,007) X_1 + 0,00000000000000000483 X_2 + 0,013 X_3 + 0,000 X_4 + 0,000 IPM + 0,000 UKD$$

Persamaan diatas menunjukkan seberapa besar tingkatan pengaruh atas variabel independen  $X_1$ ,  $X_2$ ,  $X_3$ ,  $X_4$ , IPM ( $X_5$ ), UKD ( $X_6$ ) terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah sebagai variabel Y. Penjelasan adalah sebagai berikut:

1.  $a = 0,057$

Dalam hasil uji regresi linear berganda tersebut menunjukkan nilai konstanta yaitu sebesar 0,057. Nilai tersebut memiliki arti apabila pertumbuhan ekonomi( $X_1$ ), ukuran pemerintah daerah( $X_2$ ), tingkat pendidikan kepala daerah( $X_3$ ), dan umur kepala daerah( $X_4$ ) tidak memiliki nilai, artinya kinerja keuangan pemerintah daerah sebesar 0,057.

2.  $b_1 = -0,007$

Hasil uji koefisien regresi dalam penelitian ini menunjukkan nilai sebesar -0,007 yang artinya hubungan pengaruhnya berlawanan yaitu apabila pertumbuhan ekonomi ( $X_1$ ) menurun sehingga kinerja keuangan pemerintah daerah (Y) akan meningkat sebesar 0,007 dengan ketentuan variabel independen yang lain konstan.

3.  $b_2 = 0,000000000000000483$

Hasil uji koefisien regresi dalam penelitian ini menunjukkan nilai sebesar 0,000000000000000483 yang artinya apabila ukuran pemerintah daerah ( $X_2$ ) meningkat sehingga kinerja keuangan pemerintah daerah (Y) akan meningkat juga sebesar 0,000000000000000483 dengan ketentuan variabel independen yang lain konstan.

4.  $b_3 = 0,013$

Hasil uji koefisien regresi dalam penelitian ini menunjukkan nilai sebesar 0,013 yang artinya apabila tingkat pendidikan kepala daerah( $X_3$ )

meningkat sehingga kinerja keuangan pemerintah daerah (Y) akan meningkat juga sebesar 0,013 dengan ketentuan variabel independen yang lain konstan.

5.  $b_4 = 0,000$

Hasil uji koefisien regresi dalam penelitian ini menunjukkan nilai sebesar 0,000 yang artinya umur pemerintah daerah ( $X_4$ ) bernilai konstan sehingga kinerja keuangan pemerintah daerah memiliki nilai konstanta sebesar 0,057

6.  $b_5 = 0,000$

Hasil uji koefisien regresi menunjukkan nilai sebesar 0,000 yang artinya indeks pembangunan manusia ( $X_5$ ) bernilai konstan sehingga kinerja keuangan pemerintah daerah memiliki nilai konstanta sebesar 0,057

7.  $b_6 = 0,000$

Hasil uji koefisien regresi menunjukkan nilai sebesar 0,000 yang artinya umur kepala daerah ( $X_6$ ) bernilai konstan sehingga kinerja keuangan pemerintah daerah memiliki nilai konstanta sebesar 0,057.

## 4.7 Pembahasan

### 4.7.1 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil uji hipotesis dalam penelitian ini membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi ( $H_1$ ) tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja

keuangan pemerintah daerah. Hasil tersebut dibuktikan dengan hasil uji yang menunjukkan nilai signifikansi 0,104 yang lebih besar dari 0,05 dengan nilai koefisien regresi sebesar -0,007. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terjadinya peningkatan dan penurunan suatu pertumbuhan ekonomi daerah tidak memiliki pengaruh atas kualitas kinerja keuangan pemerintah daerah sehingga H<sub>1</sub> **tidak didukung**.

Pada penelitian ini pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, hal tersebut kemungkinan karena dipengaruhi oleh tingkat investasi yang belum terealisasi secara optimal sehingga belum mampu mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi. Kondisi tersebut juga didorong dengan infrastruktur serta sarana prasarana yang belum mampu menopang aktivitas ekonomi yang berjalan di suatu daerah sehingga belum mampu mewujudkan peningkatan asli daerah atas sektor tersebut dan mewujudkan kinerja keuangan yang lebih baik.

Ditinjau dari perspektif teori institusional, penelitian ini menyatakan semakin besar tekanan normatif dalam hal ini tingkat pertumbuhan ekonomi tidak memiliki keterkaitan dalam menunjukkan kinerja pemerintah daerah yang lebih baik. Pertumbuhan yang memiliki nilai positif berarti mampu mendorong kegiatan atau aktivitas lainnya seperti aktivitas investasi pada suatu daerah yang mendorong pembangunan infrastruktur daerah (Deprianto et.al., 2013). Pertumbuhan ekonomi mendukung tekanan isomorfisme koersif

dimana pertumbuhan ekonomi yang bernilai positif mendorong peningkatan modal bagi pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kinerja yang baik dengan meningkatkan nilai investasi dan pendapatan asli daerah. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dalam kinerja keuangan pemerintah daerah menghasilkan hubungan yang tidak sejalan (positif) sehingga pertumbuhan ekonomi suatu pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Penelitian ini menunjukkan hasil yang sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Heryanti, Wahidahwati, dan Suryono (2019) yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini juga seirama dengan penelitian Martantri (2019) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

#### 4.7.2 Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil uji hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini membuktikan bahwa ukuran pemerintah daerah ( $H_2$ ) tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil tersebut dibuktikan dengan hasil uji yang menunjukkan nilai signifikansi 0,089 yang lebih besar dari 0,05 dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,00000000000000483. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa terjadinya peningkatan dan penurunan suatu ukuran



pemerintah daerah dengan merujuk kepada nilai total aset suatu daerah tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas kinerja keuangan pemerintah daerah sehingga H<sub>2</sub> **tidak didukung**.

Ukuran pemerintah daerah dapat ditinjau melalui total aset suatu daerah atau luas daerah berikut dengan jumlah penduduk daerah tersebut. Ukuran pemerintah daerah yang besar mendorong aktivitas operasional semakin mudah serta membantu kegiatan layanan masyarakat yang mencukupi (Kusumawardani, 2012). Aktivitas operasional yang berjalan baik membantu meningkatkan penerimaan atau Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut. Pada penelitian ini pengukuran ukuran pemerintah diukur dengan menggunakan total aset dari setiap pemerintahan daerah. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Penyebab yang mempengaruhi tidak terdapatnya pengaruh ukuran pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kemungkinan karena antara lain semakin besar suatu total aset memberikan kesulitan tersendiri dalam pengelolaan dan pemanfaatan aset yang dimiliki suatu daerah. Sebaliknya, pemerintah daerah yang memiliki total aset kecil kemungkinan mengalami keterbatasan aset dan dana sehingga tidak memungkinkan dibentuknya program yang sama dengan daerah yang total asetnya lebih besar dalam memberikan nilai aset baru.

Faktor lain seperti pandangan masyarakat atas suatu pemerintah daerah yang besar akan memberikan tekanan terhadap pemerintahan daerah dalam bertanggungjawab atas kewajibannya, dimana tekanan tersebut berdampak terhadap tuntutan kinerja yang semakin baik dari perusahaan (Sumarjo, 2010). Ukuran pemerintah daerah mengundang perhatian publik untuk melakukan pengawasan atas pengelolaan aset dalam pemerintah daerah sehingga mendorong munculnya tekanan koersif terhadap pemerintah daerah untuk bertanggungjawab atas kinerja keuangannya. Bentuk pengawasan tersebut menimbulkan tekanan bagi pemerintah terhadap pengelolaan keuangan dan peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Ditinjau dari perspektif teori institusional, hasil penelitian ini ternyata mengungkapkan bahwa ukuran pemerintah daerah tidak memiliki keterkaitan terhadap kinerja pemerintah daerah yang diukur melalui total aset daerah terkait. Dengan demikian, tekanan *coercive* yang diduga akan mempengaruhi kinerja pemerintah daerah tidak terbukti.

Penelitian ini menunjukkan hasil yang selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Tama (2018) yang menyatakan bahwa ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

#### 4.7.3 Pengaruh Tingkat Pendidikan Kepala Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil uji hipotesis dalam penelitian ini membuktikan bahwa tingkat pendidikan kepala daerah ( $H_3$ ) memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi sebesar 0,048 yang artinya lebih kecil dari nilai 0,05 dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,013 sehingga dapat dinyatakan  $H_3$  **didukung**.

Menurut Prayitno dalam Ridho (2021) seorang Eksekutif dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi memiliki kognitif yang ternilai kompleks. Hal tersebut mendorong kepala daerah menciptakan inovasi melalui ide-ide baru yang dimilikinya. Pendidikan mencerminkan kredibilitas atau rasa percaya diri seorang kepala daerah dalam membangun jembatan komunikasi untuk mendorong pemanfaatan sumber daya daerah sehingga meningkatkan kinerja pemerintah daerah (Beccera, 2014).

Tingkat pendidikan pada penelitian ini menunjukkan terdapat jaminan bahwa tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan menghasilkan kinerja keuangan pemerintah daerah yang lebih baik. Hasil olah data menunjukkan tingkat pendidikan kepala daerah di Indonesia yang menunjukkan hubungan positif dengan kinerja keuangan daerah tercatat pada tingkatan pendidikan SLTA sebesar 8%, Strata 1 29,2%, Strata 2 47,2%, dan Strata sebesar 15,2%.

Berdasarkan pada perspektif teori institusional, tingkat pendidikan kepala daerah menimbulkan tekanan normatif karena dengan pendidikan yang lebih tinggi mendorong seseorang harus memiliki sikap yang profesional. Pendidikan yang lebih tinggi mendorong seorang kepala daerah untuk mampu memberikan tanggung jawab dan memiliki kemampuan kinerja yang lebih baik. Kepala daerah dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung menerima tekanan dan tuntutan yang lebih besar dari masyarakat dalam mengelola daerah yang dipimpinnya. Pandangan tersebut memberikan tekanan terhadap kepala daerah untuk menguji keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki oleh kepala daerah dalam melaksanakan tanggung jawab serta menghasilkan kinerja keuangan yang baik. Penelitian ini menyatakan temuan bahwa tingkat pendidikan kepala daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah.

Penelitian ini menunjukkan hasil yang seirama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mahardini (2014) yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan kepala daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

#### 4.7.4 Pengaruh Umur Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil uji hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini membuktikan bahwa umur pemerintah daerah ( $H_4$ ) tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja

keuangan pemerintah daerah, ditunjukkan dengan nilai signifikansi sebesar 0,130 yang artinya lebih besar dari nilai 0,05 dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,000. Penelitian ini dapat dinyatakan bahwa umur pemerintah daerah tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah sehingga dapat disimpulkan  $H_4$  **tidak didukung**.

Umur pemerintah daerah dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan, hal ini dapat disebabkan kemungkinan karena oleh beberapa faktor seperti ketidakmampuan pengelolaan sumber daya pemerintah yang ada oleh pegawai, sistem pengelolaan keuangan yang belum diterapkan secara maksimal oleh pemerintah daerah, serta diperlukannya evaluasi ulang terhadap ide atau program yang sebelumnya telah ditetapkan. Umur pemerintah yang tergolong baru dengan kinerja keuangan yang lebih baik cenderung memiliki pegawai yang mampu menghasilkan inovasi untuk sebuah program yang berpotensi mendatangkan pemasukan atau memberikan layanan yang lebih memuaskan serta meningkatkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, dan ekonomis.

Umur pemerintah daerah mengilustrasikan kedewasaan, serta kematangan dan profesionalitas sehingga dengan umur suatu pemerintahan daerah yang lebih tua mengindikasikan tingkat kematangan dan kedewasaan serta tingkat profesional pemerintahan daerah dalam pengambilan keputusan terbaik untuk mengelola keuangan daerah demi terwujudnya kinerja keuangan

daerah yang lebih baik. Sebuah pemerintah daerah dengan umur administratif lebih lama mengindikasikan memiliki pengalaman dan tingkat profesionalitas yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah dengan umur yang lebih lama cenderung memiliki pengalaman dan kemampuan yang lebih sebagai bekal dalam proses evaluasi pada akhir periode. Melalui proses tersebut mampu menciptakan perubahan yang berimbas pada peningkatan kinerja yang lebih baik. Penelitian ini menyatakan bahwa umur pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Berkaitan dengan teori institusional umur pemerintah daerah dapat dikatakan didorong oleh tekanan *normative isomorphism*, karena dengan umur pemerintah daerah yang terus bertambah dan pengalaman yang semakin yang lebih banyak mengharuskan untuk menunjukkan kinerja keuangan yang lebih baik melalui keputusan yang strategis dan kinerja keuangan yang baik. Penelitian ini memberikan pernyataan yang berbanding terbalik dimana umur pemerintah daerah dinyatakan tidak memperoleh hubungan yang positif sehingga dinyatakan umur pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah.

Penelitian ini menunjukkan hasil yang selaras dengan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Putri (2014) yang menyatakan bahwa

umur pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

#### 4.7.5 Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa indeks pembangunan manusia tidak memiliki pengaruh dalam kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi sebesar 0,700 yang artinya lebih besar dari nilai 0,05 dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,000. Penelitian ini dapat dinyatakan bahwa indeks pembangunan manusia tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Indeks Pembangunan Manusia atau IPM adalah kondisi yang mengilustrasikan hasil pembangunan melalui tingkat pendapatan, pendidikan, kesehatan serta lainnya dalam mengukur tingkat keberhasilan dalam membangun kualitas hidup masyarakat. Terdapat tiga dimensi dasar dalam pembentukan IPM yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak.

Kemungkinan karena mengapa indeks pembangunan manusia tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dapat disebabkan ketidaksiapan pemerintah daerah dalam memberikan wadah bagi masyarakat dalam rangka peningkatan indeks pembangunan daerah pada

daerah terkait. Faktor lain seperti tidak mampu memanfaatkan Dana Alokasi Umum (DAU) yang berdampak pada gagalnya pencapaian target dalam meningkatkan kualitas masyarakat berkaitan dengan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak.

#### 4.7.6 Pengaruh Umur Kepala Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa umur kepala daerah tidak memiliki pengaruh dalam kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi sebesar 0,831 yang artinya lebih besar dari nilai 0,05 dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,000. Penelitian ini dapat dinyatakan bahwa umur kepala daerah tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Umur kepala daerah merupakan tolak ukur atau variabel yang menunjukkan kemampuan, kematangan, dan kedewasaan seorang kepala daerah dalam pengambilan keputusan untuk meningkatkan kinerja keuangan yang baik.

Kemungkinan karena mengapa umur kepala daerah tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dapat disebabkan karena keterbatasan atau minimnya penguasaan atas pengetahuan dan keterampilan mengenai bidang manajemen keuangan dan ekonomi sehingga tidak mampu memanfaatkan sumber daya (*resources*) pemerintah daerah



terkait. Faktor lain yang secara berkesinambungan seperti pengambilan keputusan yang tidak tepat dalam penggunaan anggaran yang ternyata mengalami pembengkakan sehingga membutuhkan anggaran lebih merusak perhitungan anggaran yang telah direncanakan dan mengganggu kinerja program lain.



## BAB V

### KESIMPULAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian analisis data dalam penelitian ini mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi, ukuran pemerintah daerah, tingkat pendidikan kepala daerah, dan umur kepala daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang memiliki arti bahwa pertumbuhan ekonomi yang mengalami peningkatan atau penurunan suatu pertumbuhan ekonomi daerah tidak memiliki pengaruh atas kualitas atau peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah. Variabel pertumbuhan ekonomi pada penelitian ini memiliki nilai signifikansi adalah sebesar 0,104 yang artinya nilai signifikansi lebih besar ( $> 0,05$ ) dari 0,05. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dan dapat disimpulkan  $H_1$  ditolak.
2. Ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang memiliki arti bahwa terjadinya peningkatan dan penurunan suatu ukuran pemerintah daerah dalam hal ini berdasarkan nilai total aset suatu daerah tidak memiliki pengaruh atas kualitas kinerja keuangan

pemerintah daerah. Variabel ukuran pemerintah daerah memiliki nilai signifikansi adalah sebesar 0,089 yang artinya nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dan dapat disimpulkan  $H_2$  ditolak.

3. Tingkat pendidikan kepala daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang memiliki arti bahwa pendidikan yang lebih tinggi mampu mendorong seseorang secara penuh untuk memiliki sikap yang profesional serta mendorong seorang kepala daerah untuk mampu memberikan tanggung jawab dan memiliki kemampuan kinerja yang lebih baik. Tingkat Pendidikan memiliki nilai signifikansi adalah sebesar 0,048 yang artinya nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat pendidikan kepala daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dan dapat disimpulkan  $H_3$  diterima.
4. Umur pemerintah daerah tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang memiliki arti bahwa pengalaman dan profesionalitas tidak secara baik diterapkan walaupun dengan banyaknya periode yang telah terlewati tidak menunjukkan kualitas kinerja keuangan pemerintah daerah yang lebih baik. Variabel ukuran pemerintah daerah memiliki nilai signifikansi adalah sebesar 0,130 yang artinya nilai signifikansi lebih besar

dari 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dan dapat disimpulkan  $H_2$  ditolak.

## 5.2 Keterbatasan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan yaitu sebagai berikut:

1. Data yang digunakan serta hasil dari penelitian ini hasil analisis langsung oleh penulis yang kemungkinan terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam proses pengumpulan data dan pengamatan. Besar kemungkinan hasil penelitian yang lebih akurat apabila didukung pihak-pihak terkait dengan melakukan interaksi secara langsung.
2. Minimnya sumber informasi dan proses pengumpulan data yang bersifat bertahap seperti permintaan data melalui E-PPID Pusat yaitu layanan yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Republik Indonesia menyebabkan harus lebih banyak membutuhkan waktu dalam menunggu proses permintaan selesai yang kemudian informasi dapat digunakan. Selain itu dalam proses pengumpulan data, peneliti seringkali mengalami keterbatasan dalam memperoleh data yang dibutuhkan dari berbagai sumber.
3. Penggunaan data yang berfokus pada hasil publikasi tahun 2018 dikarenakan publikasi data yang terbatas ditahun setelahnya pada beberapa

jenis data dibanding tahun 2018. Keterbatasan ini merujuk pada data yang masih bersifat sementara dan tidak akurat pada publikasi yang ada. Pandemi covid-19 menjadi satu kendala yang berdampak pada keterbatasan publikasi sehingga peneliti lebih memilih data tahun 2018 yang lebih akurat. Kondisi pada tahun tersebut menjadi pilihan terbaik untuk menguji data karena jadwal pemilihan umum yang minim dibanding tahun sebelumnya.

### 5.3 Saran

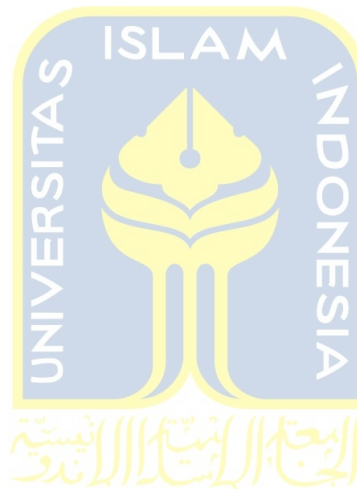
Berdasarkan pada hasil akhir serta uraian keterbatasan pada penelitian yang telah dilakukan peneliti menyarankan untuk:

1. Penelitian selanjutnya dengan topik yang serupa dapat menggunakan variabel independen lain seperti masa jabatan kepala daerah, pendapatan asli daerah, ukuran legislatif serta menambahkan variabel kontrol lainnya untuk memberikan hasil yang lebih berkualitas dan sebagai variabel yang mengontrol variabel lain untuk hasil yang lebih baik.
2. Penggunaan yang lebih besar dalam menggunakan sampel untuk memberikan hasil penelitian yang lebih signifikan. Penggunaan sampel pada penelitian ini terbatas dikarenakan kondisi dari pemerintah daerah yang pada tahun tersebut tidak memenuhi kriteria sampel.
3. Bagi pemerintah diharapkan hasil penelitian ini menjadi bahan pertimbangan khususnya pemerintahan daerah kabupaten dan kota terkait

kinerja keuangan pemerintah daerah untuk periode-periode selanjutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap masyarakat.

4. Pertumbuhan ekonomi pada setiap daerah yang senantiasa mengalami perubahan pada periode-periode sebelumnya diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagaimana merencanakan sebuah program yang efisien, efektif, dan ekonomis yang mampu mengestimasi pengeluaran namun surplus pada pos pemasukan. Selain itu, ukuran pemerintah daerah dan umur pemerintah daerah yang menunjukkan bagaimana suatu pemerintah daerah seharusnya dengan pengalaman yang lebih profesional mampu memanfaatkan kekayaan atau aset daerah setempat untuk kebutuhan masyarakat. Kinerja keuangan pemerintah daerah sepatutnya harus didukung dengan wujud kepemimpinan pemerintah daerah melalui tingkat pendidikan kepala daerah yang memiliki potensi dan kemampuan dalam menciptakan inovasi dan kematangan berpikir dalam pengambilan keputusan yang strategis dalam pengelolaan keuangan daerahnya. Dalam rangka mencapai Indonesia Emas di tahun 2045 sepatutnya pemerintah terus membantu mendorong kualitas pendidikan masyarakat melalui program pembangunan berkelanjutan di bidang pendidikan. Pemerintah seharusnya membuat peraturan terbaru terkait kewajiban masyarakat dalam mengenyam masa wajib pendidikan dan pula memberikan bantuan kepada mereka yang mengalami kesulitan melanjutkan pendidikan karena

alasan ekonomi. Hal ini merupakan wujud usaha pemerintah dalam menciptakan sumber daya yang berkualitas yang salah satunya tercerminkan pada tingkat pendidikan kepala daerah yang terbukti memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah..



## DAFTAR PUSTAKA

- Alvini, Y. (2018). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Tingkat Kekayaan Daerah, Tingkat Ketergantungan Daerah Kepada Pemerintah Pusat dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *JOM FEB*, 1(1), 1-15.
- Badan Pusat Statistik. (2023). Diakses pada 15 Maret, 2023, from <https://www.bps.go.id/subject/11/produk-domestik-bruto-lapangan-usaha-.html>
- Budiarto, D. S., & Indarti, L. (2019). Apakah Karakteristik Pemerintah Daerah Berpengaruh Pada Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 12(1), 19-31.
- Deprianto, Asrizal, & Jolianis. (2013). *Pengaruh Konsumsi dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Padang*. Dipetik Maret 17, 2023, dari <https://www.neliti.com/publications/29811/pengaruh-konsumsi-dan-investasi-terhadap-pertumbuhan-ekonomi-di-kota-padang>
- DiMaggio, P., & Powell, W. (1983). The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields. *American Sociological Association*, 48(2), 147-160.
- Farisa, F. C. (2019). (F. J. Kuwado, Editor) Retrieved from KOMPAS.com: <https://nasional.kompas.com/read/2019/12/11/11101391/rabu-ini-mk-putuskan-soal-batas-minimal-usia-calon-kepala-daerah>
- Fitriyah, A. (2016). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Universitas Sebelas Maret*.
- Ghozali. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25 edisi ke-9*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hambrick, D. C., & Mason, P. A. (1984, April). Upper Echellons: The Organization as a Reflection of Its Top Managers. *JSTOR*, 9(2), 193-206. doi:<https://doi.org/10.2307/258434>
- Heryanti, C. D., Wahidahwati, & Suryono, B. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 8(8).
- Indonesia, B. (2023, Februari 6). Diakses pada 22 Mei, 2023, dari [https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp\\_252823.aspx](https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_252823.aspx)
- Kusumawardani, M. (2012, Agustus). Pengaruh Size, Kemakmuran, Ukuran Legislatif, Leverage Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. *Accounting Analysis Journal*, 1(1), 28-35.



- Lipsey, R. G. (2008, July). Economic Growth Related to Mutually Interdependent Institutions and Technology. *Simon Fraser University Economics*.
- Mahardini, N. Y. (2014). Pengaruh Karakteristik Kepala Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah di Indonesia Dengan Lokasi Pemerintahan, Jumlah Populasi, dan Besar APBD Sebagai Variabel Kontrol. *Universitas Sebelas Maret-Pascasarjana Prodi Akuntansi*, 52-59. doi:<https://doi.org/10.26714/jsunimus.5.1.2017.%25p>
- Mahmudi. (2011). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UII Press: Yogyakarta., 2016.
- Maimunah, S., Nur, I. M., & Karim, A. (2017, Mei). Pemodelan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Provinsi Jawa Tengah Menggunakan Regresi Kuantil. *Jurnal Statistika Universitas Muhammadiyah Semarang*, 5(1), 52-59. doi:<https://doi.org/10.26714/jsunimus.5.1.2017.%25p>
- Marhawai. (2015, Januari). Pengaruh Ukuran Legislatif, Kemakmuran Pemerintah Daerah, Ukuran Pemerintah daerah, dan Intergovernmental Terhadap Kinerja Keuangan Daerah. *Journal of Accounting Research and Review*, 8(1), 49-58.
- Martantri, N. (2019, 08 08). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Leverage Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah daerah. *Dspace uii*. Retrieved from <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/16695>
- Mulyani, S., & Wibowo, H. (2017). Pengaruh Belanja Modal, Ukuran Pemerintah Daerah, Intergovernmental revenue, Dan Pendapatan Asli daerah Terhadap Kinerja (Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2012-2015). *Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 15(1), 57-66. doi:<https://doi.org/10.30595/kompartemen.v15i1.1379>
- Nasution, N. A., & Panggabean, F. Y. (2017, Juli). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Pancabudi*, VIII(1), 1-19.
- Noer, I. A. (2014). Pengaruh Karakteristik Kepala Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah di Pulau Jawa). *Sebelas Maret University*, 12-77.
- Patrick, P. A. (2007, May). The Determinants of Organizational Innovativeness: The Adoption of GASB 34 In Pennsylvania Local Government. *The Pennsylvania State University*.
- Prasetyo, A. (2014). Karakteristik Kepala Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Indonesia. *Universitas Sebelas Maret*.
- Pratama, F. A. (2021). Pengaruh Karakteristik Kepala Daerah Terhadap Kinerja Keuangan. *Sebelas Maret University*. Retrieved from <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/93508/Pengaruh-Karakteristik-Kepala-Daerah-Terdapat-Kinerja-Kuangan-Pemerintah-Daerah>

- Putri, E. R. (2014). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Universitas Lampung*.
- Raharja, A. K., Suharno, & Harimurti, F. (2017, April). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Dan Kemiskinan Terhadap Kinerja Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi*, 13, 198-204.
- Ridho, I. T. (2021). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, Ukuran Legislatif, dan Karakteristik Kepala daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Dspace UII*.
- Romandiyah, W. S. (2018). Pengaruh Tekanan Eksternal, Komitmen Manajemen, Akuntabilitas, dan Ketidakpastian Lingkungan Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan Daerah. *Muhammad University of Ponorogo*.
- Roscoe, J. T. (1975). *Fundamental Research Statistic for The Behavioral Sciences*. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Saraswati, D., & Rioni, Y. S. (2019, Februari 13). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah daerah, Leverage, Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 9(2), 110-120. Retrieved June 26, 2023
- Sari, I. P. (2016, Februari). Pengaruh Pemerintah Daerah, PAD, Leverage, Dana Perimbangan, dan Ukuran Legislatif Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi*, 3(1), 679-692.
- Sari, N. M., & Mustanda, I. K. (2019, 8 3). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Manajemen*, 8(8), 4759-4787. doi:<https://doi.org/10.24843/EJMUNUD.2019.v08.i08.p02>
- Scot, W. R. (2004). *Institutional Theory: Contributing to a Theoretical Research Program*. Oxford University Press.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research Methods For Business: A Skill-Building Approach* (7th ed.). Chichester, West Sussex, United Kingdom: WILEY.
- Shabila, S. (2022). Pengaruh Tenaga Kerja, Konsumsi, Jumlah Penduduk dan Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Provinsi Sumatera Barat. *Open Journal System*, 20(3). doi:<https://ejurnal.bunghatta.ac.id/index.php/JFEK/article/view/20043>
- Sofyani, H., & Akbar, R. (2015). Hubungan Karakteristik PegPemerintah Daerah Dan Implementasi Sistem Pengukuran Kinerja: Perspektif Ismorfisma Institusional. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 19(3), 153-173.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Indonesia: ALFABETA. Retrieved from <https://doku.pub/documents/dokupdfcom-ebook-statistik-untuk-penelitian-by-prof-dr-sugiyono-1-30j8px1e7zlw>
- Sujarweni, V. W. (2015). *Akuntansi sektor Publik*. Yogyakarta: Pustaka Baru: Yogyakarta., 2015.
- Sukirno, S. (2019). *Makroekonomi: Teori Pengantar* (25 ed.). Depok: Rajawali Prers.

- Sutaryo. (2013). Karakteristik Eksekutif dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Universitas Sebelas Maret*.
- Tama, I. G. (2018). Pengaruh Karakteristik Kepala Daerah, Ukuran Pemerintah, dan Temuan Audit Terhadap Kinerja Keuangan Daerah. *PERSPEKTIF AKUNTANSI*, 1(1), 91-113. doi:<https://doi.org/10.24246/persi.v1i1.p91-113>
- Webster, M. (1985). *Webster's Ninth New Collegiate Dictionary*. Merriam-Webster Inc.
- Wijanarko. (2020). *Pertumbuhan Ekonomi - Pengertian-teori-dan-faktor-yang-mempengaruhi*. Diakses pada 22 Maret, 2023, from <https://ekonomi.bunghatta.ac.id/index.php/en/article/415-pertumbuhan-ekonomi-pengertian-teori-dan-faktor-yang-mempengaruhi>
- Wright, P., J.Kroll, M., Walters, B. A., & Ma, R. (2012). Intersection of Upper Echelons and . *Journal of Managerial* , 4(24), 433-449. doi:<https://www.jstor.org/stable/43488150>
- <https://e-ppid.bpk.go.id/lhp/2> Diakses Senin 22 Mei 2023
- <https://www.bps.go.id/> Diakses Rabu 24 Mei 2023

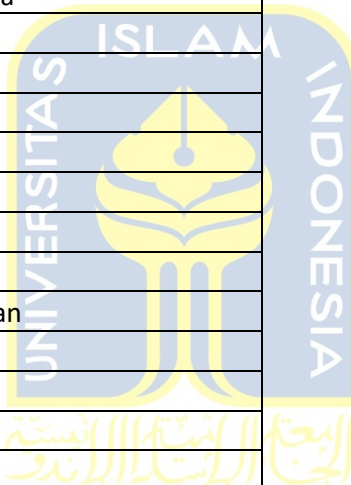


## LAMPIRAN

### LAMPIRAN 1 Daftar Sampel Kabupaten dan Kota

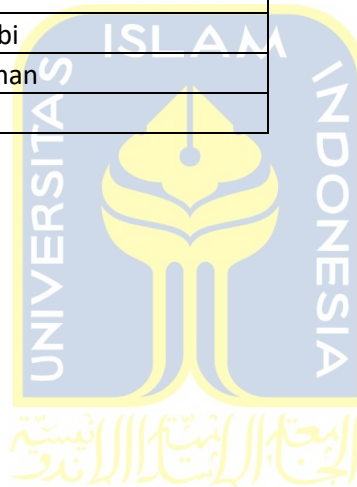
No.	Kabupaten dan Kota
1	Kabupaten Asmat
2	Kabupaten Badung
3	Kabupaten Balangan
4	Kota Banda Aceh
5	Kota Bandar Lampung
6	Kabupaten Banggai
7	Kabupaten Bangka Selatan
8	Kabupaten Bangka Tengah
9	Kota Banjarbaru
10	Kabupaten Banjarnegara
11	Kabupaten Bantul
12	Kota Batam
13	Kota Batu
14	Kabupaten Bekasi
15	Kabupaten Belitung Timur
16	Kabupaten Bengkulu
17	Kabupaten Berau
18	Kota Bitung
19	Kabupaten Blitar
20	Kabupaten Boalemo
21	Kabupaten Bone Bolango
22	Kota Bontang
23	Kabupaten Brebes
24	Kabupaten Bulungan
25	Kabupaten Bungo
26	Kabupaten Buol
27	Kabupaten Buru
28	Kabupaten Buru Selatan
29	Kota Cilegon
30	Kabupaten Cianjur
31	Kota Denpasar

32	Kota Depok
33	Kabupaten Dompu
34	Kota Dumai
35	Kabupaten Gorontalo
36	Kabupaten Gowa
37	Kabupaten Gresik
38	Kabupaten Gunungkidul
39	Kabupaten Halmahera tengah
40	Kabupaten Halmahera Utara
41	Kabupaten Hulu Sungai tengah
42	Kabupaten Jayapura
43	Kota Jayapura
44	Kabupaten Jembrana
45	Kabupaten Jepara
46	Kabupaten Karimun
47	Kabupaten Karo
48	Kabupaten Kaur
49	Kota Kendari
50	Kabupaten Kolaka
51	Kota Kupang
52	Kabupaten Lamongan
53	Kabupaten Landak
54	Kabupaten Lembata
55	Kota Lhoksumawe
56	Kabupaten Lingga
57	Kabupaten Lombok Utara
58	Kabupaten Mahakam Ulu
59	Kabupaten Majene
60	Kabupaten Malaka
61	Kabupaten Malinau
62	Kabupaten Maluku Barat Daya
63	Kabupaten Maluku tengah
64	Kabupaten Mamuju
65	Kabupaten Mamuju Tengah
66	Kabupaten Maros
67	Kota Mataram
68	Kabupaten Merauke
69	Kota Metro
70	Kabupaten Minahasa Selatan



71	Kabupaten Minahasa Utara
72	Kabupaten Mojokerto
73	Kabupaten Muara Jambi
74	Kabupaten Mukomuko
75	Kabupaten Muna
76	Kabupaten Musi Rawas
77	Kabupaten Natuna
78	Kabupaten Ngada
79	Kabupaten Nunukan
80	Kabupaten Ogan Ilir
81	Kota Padang
82	Kota Palu
83	Kabupaten Pangandaran
84	Kota Pangkalpinang
85	Kabupaten Panukal Abab Lematang Ilir
86	Kota Parepare
87	Kabupaten Paser
88	Kota Pasuruan
89	Kabupaten Pesawaran
90	Kabupaten Poso
91	Kabupaten Pringsewu
92	Kabupaten Pulau Morotai
93	Kabupaten Raja Ampat
94	Kabupaten Rembang
95	Kota Sabang
96	Kota Salatiga
97	Kabupaten Samosir
98	Kabupaten Sekadau
99	Kabupaten Seluma
100	Kabupaten Serang
101	Kabupaten Siak
102	Kota Sibolga
103	Kota Singkawang
104	Kabupaten Sintang
105	Kabupaten Sleman
106	Kabupaten Solok
107	Kabupaten Sorong
108	Kota Sorong
109	Kabupaten Sukabumi

110	Kabupaten Sumbawa
111	Kota Surakarta
112	Kabupaten Tabanan
113	Kabupaten Takalar
114	Kabupaten Tambrau
115	Kabupaten Tanah Bumbu
116	Kabupaten Tanah Datar
117	Kabupaten Tangerang
118	Kota Tangerang selatan
119	Kota Tanjungpinang
120	Kabupaten Tebo
121	Kota Ternate
122	Kota Tomohon
123	Kabupaten Wakatobi
124	Kabupaten Way Kanan
125	Kota Yogyakarta



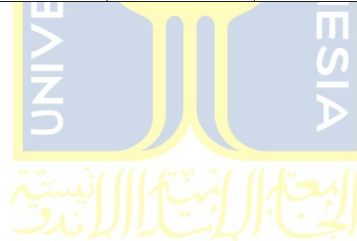
## LAMPIRAN 2 Data Penelitian

No.	Kabupaten dan Kota	Pertumbuhan Ekonomi	Ukuran Pemerintah	Tingkat Pendidikan Kepala Daerah	Umur Pemerintah daerah	Indeks Pembangunan manusia	Umur kepala Daerah	Kinerja Keuangan
1	Kabupaten Asmat	5.75	2,637,391,923,710	3	16	49.37	55	0.001
2	Kabupaten Badung	6.73	13,547,271,190,616	3	27	80.87	47	0.097
3	Kabupaten Balangan	3.12	2,343,420,753,531	4	16	67.88	61	0.157
4	Kota Banda Aceh	4.45	5,615,309,114,795	4	62	84.37	61	-0.087
5	Kota Bandar Lampung	6.19	4,845,482,340,685	4	36	76.63	63	0.039
6	Kabupaten Banggai	6.17	2,181,499,813,413	4	60	69.85	53	-0.002
7	Kabupaten Bangka Selatan	4.51	1,459,982,642,593	4	16	65.98	68	0.112
8	Kabupaten Bangka Tengah	3.42	1,386,095,748,341	5	16	69.52	57	0.150
9	Kota Banjarbaru	6.89	2,687,860,209,478	4	20	78.83	49	0.076
10	Kabupaten Banjarmasin	5.67	4,355,751,220,425	1	65	66.54	56	-0.043
11	Kabupaten Bantul	5.47	3,255,020,103,752	3	63	79.45	62	0.068
12	Kota Batam	4.96	4,304,642,843,183	4	28	80.54	56	0.094
13	Kota Batu	6.50	1,910,800,790,102	4	16	75.04	56	0.160
14	Kabupaten Bekasi	6.02	12,486,837,156,654	3	68	73.49	46	0.041
15	Kabupaten Belitung Timur	4.23	1,469,108,386,395	3	16	70.22	67	0.117
16	Kabupaten Bengkulu	-1.69	9,037,791,429,166	4	63	72.94	46	0.040
17	Kabupaten Berau	2.07	8,072,472,270,103	4	60	74.01	51	0.249
18	Kota Bitung	6.01	1,842,742,272,358	4	44	73.27	62	0.113
19	Kabupaten Blitar	5.10	4,039,394,668,251	4	63	69.93	66	0.019
20	Kabupaten Boalemo	6.69	1,434,663,237,608	3	19	64.99	59	-0.005
21	Kabupaten Bone Bolango	6.42	1,405,614,750,475	5	16	69.06	50	0.120
22	Kota Bontang	-4.08	4,697,436,263,645	3	19	79.86	59	0.183
23	Kabupaten Brebes	5.26	3,366,883,430,103	4	74	65.68	48	-0.001
24	Kabupaten Bulungan	5.06	6,036,380,906,144	3	60	71.23	65	0.091
25	Kabupaten Bungo	4.66	1,667,191,847,320	4	53	69.42	60	-0.015
26	Kabupaten Buol	2.90	1,801,392,513,805	5	19	67.30	60	0.056
27	Kabupaten Buru	6.19	1,305,928,857,363	4	19	68.25	48	0.116
28	Kabupaten Buru Selatan	6.04	1,416,634,241,562	5	11	63.62	51	0.257
29	Kota Cilegon	6.11	4,520,506,103,109	4	20	72.65	63	-0.046
30	Kabupaten Cianjur	6.24	6,136,887,781,642	4	50	64.62	38	0.067
31	Kota Denpasar	6.42	6,041,824,168,229	4	61	83.30	52	0.031
32	Kota Depok	6.98	10,190,832,640,978	4	20	80.29	58	0.033
33	Kabupaten Dompu	4.38	1,612,827,960,878	3	71	66.97	42	0.027
34	Kota Dumai	5.34	2,785,056,552,199	4	19	74.06	64	0.034
35	Kabupaten Gorontalo	6.19	1,621,056,255,185	5	59	65.78	56	0.157
36	Kabupaten Gowa	7.14	3,759,988,175,398	4	60	68.87	33	-0.005
37	Kabupaten Gresik	5.81	5,929,674,460,536	5	44	75.28	59	0.049
38	Kabupaten Gunungkidul	5.15	2,846,345,700,156	3	35	69.24	70	0.002
39	Kabupaten Halmahera Tengah	6.97	1,994,584,256,379	4	50	64.66	52	0.095
40	Kabupaten Halmahera Utara	2.41	1,744,521,332,981	3	16	67.30	63	0.008
41	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	5.17	2,124,880,963,548	4	60	68.32	52	0.026
42	Kabupaten Jayapura	7.68	2,350,807,245,562	4	50	71.25	59	0.047
43	Kota Jayapura	5.45	2,600,645,445,464	5	40	79.58	54	0.020
44	Kabupaten Jember	5.58	2,210,883,323,592	4	61	71.65	57	-0.076
45	Kabupaten Jepara	5.85	6,132,256,105,265	3	74	71.38	46	0.042



46	Kabupaten Karimun	5.04	2,155,022,302,246	5	19	70.56	54	0.126
47	Kabupaten Karo	4.55	2,534,254,911,296	3	73	73.91	55	0.029
48	Kabupaten Kaur	4.97	1,237,205,533,104	4	15	66.20	46	-0.021
49	Kota Kendari	6.08	4,781,862,688,024	4	24	82.22	41	0.089
50	Kabupaten Kolaka	5.85	2,024,686,044,730	4	68	72.07	60	0.066
51	Kota Kupang	6.59	1,854,035,176,196	5	50	78.84	59	0.012
52	Kabupaten Lamongan	5.44	5,058,850,989,440	4	64	71.97	64	0.035
53	Kabupaten Landak	4.92	2,990,628,287,762	5	20	65.45	37	0.034
54	Kabupaten Lembata	5.01	836,536,014,765	3	52	63.96	56	0.085
55	Kota Lhoksumawe	3.78	1,537,493,771,795	1	49	76.62	49	-0.169
56	Kabupaten Lingga	3.99	1,751,538,918,103	3	16	64.04	56	0.133
57	Kabupaten Lombok Utara	-0.85	1,531,635,687,584	5	11	63.83	47	-0.005
58	Kabupaten Mahakam Ulu	5.35	1,747,520,280,349	3	10	66.67	52	0.261
59	Kabupaten Majene	6.04	1,573,731,740,996	5	60	66.01	56	0.073
60	Kabupaten Malaka	5.16	1,115,998,026,173	5	13	59.66	66	-0.085
61	Kabupaten Malinau	5.77	4,840,095,778,151	5	20	71.74	59	0.030
62	Kabupaten Maluku Barat Daya	6.12	1,681,980,231,285	3	10	60.64	50	-0.170
63	Kabupaten Maluku tengah	5.93	2,122,949,857,212	3	61	70.60	63	-0.001
64	Kabupaten Mamuju	6.02	2,100,248,519,377	4	60	67.11	61	0.003
65	Kabupaten Mamuju Tengah	5.68	1,110,832,143,795	1	10	64.43	62	0.011
66	Kabupaten Maros	6.20	2,729,054,088,358	4	66	68.94	52	0.093
67	Kota Mataram	4.96	3,111,647,452,541	3	60	78.43	46	-0.004
68	Kabupaten Merauke	8.11	4,261,034,236,887	4	49	69.38	47	0.131
69	Kota Metro	5.69	2,808,143,461,945	3	72	76.22	69	-0.047
70	Kabupaten Minahasa Selatan	6.10	1,737,135,263,923	4	15	70.86	51	0.046
71	Kabupaten Minahasa Utara	6.42	1,523,418,712,574	3	15	73.05	57	-0.020
72	Kabupaten Mojokerto	5.88	5,701,435,154,417	3	69	72.64	41	0.042
73	Kabupaten Muara Jambi	5.02	2,253,551,124,880	4	20	68.34	42	0.087
74	Kabupaten Mukomuko	5.01	1,641,014,609,269	3	16	67.47	49	-0.051
75	Kabupaten Muna	5.16	2,319,994,833,451	3	59	68.47	46	0.015
76	Kabupaten Musi Rawas	5.79	3,941,875,496,734	4	76	66.18	55	0.136
77	Kabupaten Natuna	2.53	2,586,148,105,720	4	19	72.10	66	-0.005
78	Kabupaten Ngada	4.96	1,659,536,845,865	3	61	67.10	65	-0.074
79	Kabupaten Nunukan	6.28	4,904,251,228,195	4	19	65.67	33	-0.001
80	Kabupaten Ogan Ilir	5.18	2,093,955,907,157	4	16	66.43	53	0.040
81	Kota Padang	6.06	7,125,104,872,207	3	62	82.25	52	0.033
82	Kota Palu	5.00	2,513,495,500,695	4	41	80.91	56	-0.018
83	Kabupaten Pangandaran	5.32	1,944,422,444,480	3	11	67.44	55	-0.101
84	Kota Pangkalpinang	5.08	2,991,807,700,072	5	63	77.43	43	0.067
85	Kabupaten Panukal Abab Lematang Ilir	6.39	2,403,430,647,148	4	10	63.49	55	0.236
86	Kota Parepare	5.58	2,004,213,755,320	5	10	77.19	53	-0.077
87	Kabupaten Paser	3.69	6,313,509,056,615	4	12	71.61	69	0.343
88	Kota Pasuruan	5.53	2,959,817,468,870	4	58	74.78	64	0.072
89	Kabupaten Pesawaran	5.05	2,117,076,230,779	3	12	64.97	36	-0.032
90	Kabupaten Poso	6.16	2,194,091,866,198	1	66	70.68	54	0.016

91	Kabupaten Pringsewu	5.00	2,063,358,231,315	1	11	69.42	59	-0.037
92	Kabupaten Pulau Morotai	6.69	996,528,808,316	1	10	61.39	46	0.030
93	Kabupaten Raja Ampat	4.59	2,729,838,813,364	3	16	62.84	46	0.036
94	Kabupaten Rembang	5.89	2,083,375,254,651	3	74	69.46	57	0.037
95	Kota Sabang	5.91	1,311,128,243,281	1	54	74.82	47	-0.045
96	Kota Salatiga	5.84	3,112,709,787,205	3	24	82.41	52	0.008
97	Kabupaten Samosir	5.58	1,568,385,044,362	4	14	69.99	51	-0.026
98	Kabupaten Sekadau	5.82	1,807,110,908,745	4	15	63.69	53	0.048
99	Kabupaten Seluma	4.79	1,596,427,099,061	4	15	65.99	60	-0.007
100	Kabupaten Serang	5.29	3,858,002,501,553	4	19	71.68	52	0.038
101	Kabupaten Siak	1.09	5,941,420,051,530	4	20	73.73	52	0.167
102	Kota Sibolga	5.24	1,585,971,177,853	4	73	72.65	60	0.011
103	Kota Singkawang	4.64	1,829,435,258,949	3	18	71.08	47	0.039
104	Kabupaten Sintang	5.16	4,051,065,559,340	5	60	66.07	59	0.012
105	Kabupaten Sleman	6.41	4,537,884,982,107	4	63	83.42	58	0.037
106	Kabupaten Solok	5.19	1,698,249,570,573	4	63	68.60	65	0.017
107	Kabupaten Sorong	5.67	4,454,335,982,865	5	52	64.32	49	-0.124
108	Kota Sorong	6.74	3,748,213,887,750	4	19	77.35	56	-0.047
109	Kabupaten Sukabumi	5.81	4,237,919,081,039	4	58	66.05	56	0.003
110	Kabupaten Sumbawa	4.16	3,063,460,725,275	3	74	66.77	64	-0.042
111	Kota Surakarta	5.75	7,733,569,021,424	1	73	81.46	59	0.042
112	Kabupaten Tabanan	5.71	2,192,984,253,069	1	76	75.45	53	-0.005
113	Kabupaten Takalar	6.67	1,541,338,154,015	4	59	66.07	44	0.086
114	Kabupaten Tambrauw	5.22	2,146,915,618,903	4	10	51.95	55	0.051
115	Kabupaten Tanah Bumbu	3.12	3,373,140,128,315	1	16	70.05	46	0.196
116	Kabupaten Tanah Datar	5.04	1,254,031,334,684	3	63	71.25	46	0.005
117	Kabupaten Tangerang	5.80	14,356,043,519,847	4	75	71.59	45	0.031
118	Kota Tangerang selatan	7.49	20,358,502,058,443	4	10	81.17	42	0.070
119	Kota Tanjungpinang	3.20	1,580,666,189,075	3	17	78.33	58	0.008
120	Kabupaten Tebo	4.99	2,238,942,761,961	4	19	68.67	50	0.084
121	Kota Ternate	8.26	2,343,038,469,427	5	19	79.13	62	-0.044
122	Kota Tomohon	6.12	1,626,437,443,665	3	16	75.78	52	0.033
123	Kabupaten Wakatobi	6.50	1,526,935,404,868	4	15	68.52	54	0.094
124	Kabupaten Way Kanan	5.19	2,390,406,586,375	4	19	66.63	40	0.034
125	Kota Yogyakarta	5.49	4,101,991,184,624	3	72	86.11	55	0.047



## LAMPIRAN 3 Hasil Perhitungan Kinerja Keuangan Menggunakan Rasio

## Pertumbuhan Keuangan Daerah

No.	Kabupaten/kota	PADt(1)	PADt(0)	Hasil
1	Kabupaten Asmat	1,488,259,823,216	1,486,613,797,364	0.001
2	Kabupaten Badung	5,420,009,298,379	4,939,386,133,912	0.097
3	Kabupaten Balangan	1,287,174,300,896	1,112,190,404,881	0.157
4	Kota Banda Aceh	1,135,914,599,521	1,244,415,059,118	-0.087
5	Kota Bandar Lampung	2,162,096,665,248	2,081,420,040,685	0.039
6	Kabupaten Banggai	1,852,008,921,001	1,855,045,844,098	-0.002
7	Kabupaten Bangka Selatan	865,625,218,279	778,369,266,887	0.112
8	Kabupaten Bangka Tengah	890,396,701,514	774,568,409,930	0.150
9	Kota Banjarbaru	1,087,333,979,004	1,010,895,104,861	0.076
10	Kabupaten Banjarnegara	2,074,653,161,695	2,167,801,161,490	-0.043
11	Kabupaten Bantul	2,227,752,027,348	2,086,878,989,570	0.068
12	Kota Batam	2,360,092,860,079	2,157,662,190,348	0.094
13	Kota Batu	984,939,247,451	849,443,705,762	0.160
14	Kabupaten Bekasi	5,194,984,158,385	4,992,469,141,323	0.041
15	Kabupaten Belitung Timur	824,439,488,088	738,225,627,728	0.117
16	Kabupaten Bengkulu	3,359,727,964,530	3,230,782,679,458	0.040
17	Kabupaten Berau	2,319,719,448,128	1,857,586,871,722	0.249
18	Kota Bitung	967,751,473,528	869,634,357,168	0.113
19	Kabupaten Blitar	2,352,130,150,237	2,307,812,881,171	0.019
20	Kabupaten Boalemo	840,597,328,952	844,634,717,802	-0.005
21	Kabupaten Bone bolango	975,640,606,512	871,081,755,716	0.120
22	Kota Bontang	1,254,426,657,885	1,060,400,315,664	0.183
23	Kabupaten Brebes	2,854,043,939,110	2,856,934,060,543	-0.001
24	Kabupaten Bulungan	1,110,120,881,090	1,017,726,878,292	0.091
25	Kabupaten Bungo	1,261,739,448,135	1,281,019,687,622	-0.015
26	Kabupaten Buol	991,137,059,162	938,746,232,817	0.056
27	Kabupaten Buru	887,002,382,615	794,529,154,762	0.116
28	Kabupaten Buru Selatan	761,334,889,582	605,625,487,281	0.257
29	Kota Cilegon	1,630,020,024,950	1,708,838,034,694	-0.046
30	Kabupaten Cianjur	4,017,389,955,771	3,764,267,630,006	0.067
31	Kota Denpasar	2,121,040,458,231	2,058,136,261,219	0.031
32	Kota Depok	2,940,266,487,078	2,847,403,733,203	0.033

33	Kabupaten Dompu	1,062,785,010,844	1,034,675,441,820	0.027
34	Kota Dumai	1,225,296,406,097	1,185,013,276,651	0.034
35	Kabupaten Gorontalo	1,457,052,397,138	1,259,472,875,908	0.157
36	Kabupaten Gowa	1,781,396,471,000	1,790,263,499,730	-0.005
37	Kabupaten Gresik	2,876,343,695,519	2,742,201,536,264	0.049
38	Kabupaten Gunungkidul	1,850,894,408,120	1,847,105,418,583	0.002
39	Kabupaten Halmahera tengah	700,415,699,015	639,409,077,362	0.095
40	Kabupaten Halmahera Utara	1,051,774,598,760	1,043,008,874,456	0.008
41	Kabupaten Hulu Sungai tengah	1,154,034,687,129	1,125,165,680,318	0.026
42	Kabupaten Jayapura	1,284,760,057,130	1,226,783,965,443	0.047
43	Kota Jayapura	1,264,260,331,071	1,239,051,683,381	0.020
44	Kabupaten Jembrana	1,096,498,631,327	1,186,843,211,312	-0.076
45	Kabupaten Jepara	2,255,843,022,157	2,165,074,563,873	0.042
46	Kabupaten Karimun	1,289,048,277,394	1,144,433,759,943	0.126
47	Kabupaten Karo	1,495,138,180,332	1,453,205,992,340	0.029
48	Kabupaten Kaur	750,536,795,649	766,260,347,928	-0.021
49	Kota Kendari	1,232,806,862,310	1,131,987,995,497	0.089
50	Kabupaten Kolaka	1,155,131,428,043	1,083,491,774,906	0.066
51	Kota Kupang	1,169,535,197,600	1,156,105,794,118	0.012
52	Kabupaten Lamongan	2,811,062,543,333	2,716,042,671,044	0.035
53	Kabupaten Landak	1,331,244,857,250	1,287,252,892,337	0.034
54	Kabupaten Lembata	793,953,759,022	731,606,447,232	0.085
55	Kota Lhoksumawe	749,405,667,506	901,721,200,897	-0.169
56	Kabupaten Lingga	843,812,824,764	744,753,381,782	0.133
57	Kabupaten Lombok Utara	906,160,522,694	910,951,577,444	-0.005
58	Kabupaten Mahakam Ulu	1,243,940,110,760	986,212,193,019	0.261
59	Kabupaten Majene	89,315,943,000	83,238,112,411	0.073
60	Kabupaten Malaka	753,814,119,597	823,512,988,697	-0.085
61	Kabupaten Malinau	1,355,203,636,062	1,315,703,866,959	0.030
62	Kabupaten Maluku Barat Daya	826,551,006,773	995,609,326,719	-0.170
63	Kabupaten Maluku tengah	1,622,330,833,343	1,623,326,798,902	-0.001
64	Kabupaten Mamuju	1,090,319,370,020	1,087,434,107,522	0.003
65	Kabupaten Mamuju Tengah	623,527,716,638	616,641,469,808	0.011
66	Kabupaten Maros	1,420,698,891,624	1,299,787,473,996	0.093

67	Kota Mataram	1,418,432,870,483	1,424,072,893,722	-0.004
68	Kabupaten Merauke	2,142,464,498,947	1,894,986,652,311	0.131
69	Kota Metro	850,862,998,519	893,188,558,895	-0.047
70	Kabupaten Minahasa Selatan	1,021,645,339,244	976,783,270,721	0.046
71	Kabupaten Minahasa Utara	927,613,422,615	946,491,573,730	-0.020
72	Kabupaten Mojokerto	2,434,620,262,423	2,335,531,986,038	0.042
73	Kabupaten Muara Jambi	1,319,276,321,829	1,213,659,732,899	0.087
74	Kabupaten Mukomuko	849,294,370,394	894,715,650,814	-0.051
75	Kabupaten Muna	1,123,587,435,927	1,107,116,581,351	0.015
76	Kabupaten Musi Rawas	1,759,880,995,093	1,549,566,489,528	0.136
77	Kabupaten Natuna	969,214,535,605	974,020,353,334	-0.005
78	Kabupaten Ngada	761,773,721,395	823,087,019,373	-0.074
79	Kabupaten Nunukan	1,189,894,994,092	1,191,484,412,626	-0.001
80	Kabupaten Ogan Ilir	1,417,185,838,010	1,363,217,799,739	0.040
81	Kota Padang	2,160,375,621,454	2,092,277,707,122	0.033
82	Kota Palu	1,316,087,928,104	1,340,647,282,633	-0.018
83	Kabupaten Pangandaran	1,137,277,065,389	1,264,692,835,455	-0.101
84	Kota Pangkalpinang	915,529,305,584	858,376,081,019	0.067
85	Kabupaten Panukal Abab Lematang Ilir	1,226,434,373,053	992,302,734,752	0.236
86	Kota Parepare	823,930,414,121	892,260,740,552	-0.077
87	Kabupaten Paser	2,059,224,450,206	1,533,488,349,143	0.343
88	Kota Pasuruan	903,243,732,279	842,685,745,331	0.072
89	Kabupaten Pesawaran	1,285,923,925,073	1,328,405,995,757	-0.032
90	Kabupaten Poso	1,308,174,613,015	1,287,408,975,643	0.016
91	Kabupaten Pringsewu	1,150,545,601,855	1,194,493,674,540	-0.037
92	Kabupaten Pulau Morotai	659,422,409,994	640,506,962,379	0.030
93	Kabupaten Raja Ampat	1,204,953,468,562	1,163,452,153,393	0.036
94	Kabupaten Rembang	1,785,911,075,230	1,722,252,909,030	0.037
95	Kota Sabang	617,065,184,869	646,136,294,980	-0.045
96	Kota Salatiga	889,992,411,250	882,764,082,111	0.008
97	Kabupaten Samosir	802,686,254,059	823,802,199,615	-0.026
98	Kabupaten Sekadau	885,826,592,485	844,924,448,240	0.048
99	Kabupaten Seluma	892,233,060,072	898,894,826,263	-0.007
100	Kabupaten Serang	2,918,628,102,041	2,810,704,635,828	0.038
101	Kabupaten Siak	1,945,677,358,330	1,666,987,143,295	0.167
102	Kota Sibolga	622,367,464,687	615,864,227,562	0.011
103	Kota Singkawang	879,090,770,463	845,956,950,690	0.039

104	Kabupaten Sintang	1,973,959,684,474	1,950,621,461,745	0.012
105	Kabupaten Sleman	2,712,794,080,456	2,615,515,097,398	0.037
106	Kabupaten Solok	1,163,604,738,667	1,144,553,785,047	0.017
107	Kabupaten Sorong	1,416,734,510,015	1,616,710,353,686	-0.124
108	Kota Sorong	949,882,339,384	996,924,454,477	-0.047
109	Kabupaten Sukabumi	3,762,187,754,583	3,750,151,137,874	0.003
110	Kabupaten Sumbawa	1,604,617,445,655	1,675,057,372,641	-0.042
111	Kota Surakarta	1,879,056,016,679	1,803,920,801,907	0.042
112	Kabupaten Tabanan	1,862,277,203,959	1,871,864,102,726	-0.005
113	Kabupaten Takalar	1,153,908,752,435	1,062,726,104,051	0.086
114	Kabupaten Tambrauw	1,056,301,869,305	1,005,510,324,624	0.051
115	Kabupaten Tanah Bumbu	1,585,860,733,359	1,326,169,150,566	0.196
116	Kabupaten Tanah Datar	1,230,335,931,942	1,224,559,427,709	0.005
117	Kabupaten Tangerang	5,483,337,186,385	5,317,411,965,150	0.031
118	Kota Tangerang selatan	3,211,105,498,451	3,000,278,801,133	0.070
119	Kota Tanjungpinang	921,104,842,116	913,479,668,123	0.008
120	Kabupaten Tebo	1,099,896,407,343	1,014,817,095,528	0.084
121	Kota Ternate	902,529,838,141	944,243,999,954	-0.044
122	Kota Tomohon	658,134,039,501	636,874,853,527	0.033
123	Kabupaten Wakatobi	819,176,075,739	748,730,823,644	0.094
124	Kabupaten Way Kanan	1,385,711,587,665	1,340,655,509,814	0.034
125	Kota Yogyakarta	1,736,919,997,852	1,659,277,141,816	0.047

## LAMPIRAN 4 Hasil Perhitungan Pertumbuhan Ekonomi

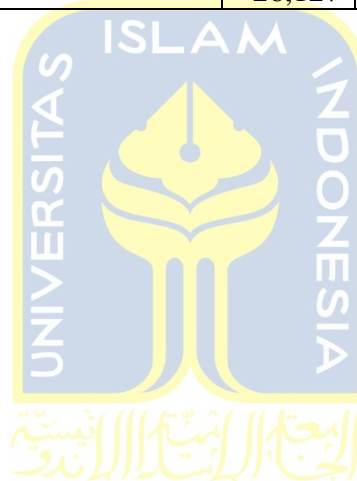
No.	Kabupaten dan Kota	PDB(t)	PDB(t-1)	Persentase (%)	Hasil
1	Kabupaten Asmat	1,453	1,374	100	5.75
2	Kabupaten Badung	35,275	33,052	100	6.73
3	Kabupaten Balangan	9,121	8,845	100	3.12
4	Kota Banda Aceh	14,557	13,937	100	4.45
5	Kota Bandar Lampung	37,084	34,921	100	6.19
6	Kabupaten Banggai	18,361	17,294	100	6.17
7	Kabupaten Bangka Selatan	6,024	5,764	100	4.51
8	Kabupaten Bangka Tengah	5,813	5,621	100	3.42
9	Kota Banjar Baru	5,833	5,457	100	6.89
10	Kabupaten Banjarnegara	14,438	13,663	100	5.67
11	Kabupaten Bantul	18,151	17,210	100	5.47
12	Kota Batam	102,719	97,863	100	4.96
13	Kota Batu	11,066	10,391	100	6.50
14	Kabupaten Bekasi	241,949	228,204	100	6.02
15	Kabupaten Belitung Timur	5,326	5,110	100	4.23
16	Kabupaten Bengkalis	77,848	79,190	100	-1.69
17	Kabupaten Berau	26,769	26,227	100	2.07
18	Kota Bitung	10,736	10,127	100	6.01
19	Kabupaten Blitar	24,286	23,107	100	5.10
20	Kabupaten Boalemo	3,284	3,078	100	6.69
21	Kabupaten Bone bolango	2,965	2,786	100	6.42
22	Kota Bontang	41,316	43,073	100	-4.08
23	Kabupaten Brebes	31,060	29,509	100	5.26
24	Kabupaten Bulungan	11,106	10,571	100	5.06
25	Kabupaten Bungo	12,046	11,510	100	4.66
26	Kabupaten Buol	3,874	3,765	100	2.90
27	Kabupaten Buru	1,475	1,389	100	6.19
28	Kabupaten Buru Selatan	843	795	100	6.04
29	Kota Cilegon	70,502	66,445	100	6.11
30	Kabupaten Cianjur	30,320	28,539	100	6.24
31	Kota Denpasar	34,166	32,105	100	6.42
32	Kota Depok	45,979	42,981	100	6.98
33	Kabupaten Dompu	4,843	4,640	100	4.38
34	Kota Dumai	23,538	22,345	100	5.34
35	Kabupaten Gorontalo	8,349	7,862	100	6.19

36	Kabupaten Gowa	12,826	11,971	100	7.14
37	Kabupaten Gresik	96,132	90,856	100	5.81
38	Kabupaten Gunungkidul	12,915	12,282	100	5.15
39	Kabupaten Halmahera tengah	1,428	1,335	100	6.97
40	Kabupaten Halmahera Utara	3,658	3,572	100	2.41
41	Kabupaten Hulu Sungai tengah	4,661	4,432	100	5.17
42	Kabupaten Jayapura	9,312	8,648	100	7.68
43	Kota Jayapura	21,778	20,653	100	5.45
44	Kabupaten Jembrana	8,924	8,452	100	5.58
45	Kabupaten Jepara	20,170	19,055	100	5.85
46	Kabupaten Karimun	9,016	8,583	100	5.04
47	Kabupaten Karo	13,744	13,146	100	4.55
48	Kabupaten Kaur	2,153	2,051	100	4.97
49	Kota Kendari	15,727	14,825	100	6.08
50	Kabupaten Kolaka	17,782	16,800	100	5.85
51	Kota Kupang	15,744	14,770	100	6.59
52	Kabupaten Lamongan	26,280	24,923	100	5.44
53	Kabupaten Landak	6,695	6,381	100	4.92
54	Kabupaten Lembata	1,110	1,057	100	5.01
55	Kota Lhoksumawe	6,841	6,592	100	3.78
56	Kabupaten Lingga	2,790	2,683	100	3.99
57	Kabupaten Lombok Utara	3,285	3,313	100	-0.85
58	Kabupaten Mahakam Ulu	1,675	1,590	100	5.35
59	Kabupaten Majene	3,373	3,181	100	6.04
60	Kabupaten Malaka	1,774	1,687	100	5.16
61	Kabupaten Malinau	7,374	6,972	100	5.77
62	Kabupaten Maluku Barat Daya	1,005	947	100	6.12
63	Kabupaten Maluku tengah	5,540	5,230	100	5.93
64	Kabupaten Mamuju	7,921	7,471	100	6.02
65	Kabupaten Mamuju Tengah	2,120	2,006	100	5.68
66	Kabupaten Maros	13,559	12,768	100	6.20
67	Kota Mataram	13,082	12,464	100	4.96
68	Kabupaten Merauke	9,584	8,865	100	8.11
69	Kota Metro	4,085	3,865	100	5.69
70	Kabupaten Minahasa Selatan	5,776	5,444	100	6.10
71	Kabupaten Minahasa Utara	8,820	8,288	100	6.42
72	Kabupaten Mojokerto	55,257	52,188	100	5.88
73	Kabupaten Muara Jambi	15,390	14,655	100	5.02
74	Kabupaten Mukomuko	3,166	3,015	100	5.01



75	Kabupaten Muna	4,808	4,572	100	5.16
76	Kabupaten Musi Rawas	12,922	12,215	100	5.79
77	Kabupaten Natuna	15,036	14,665	100	2.53
78	Kabupaten Ngada	2,199	2,095	100	4.96
79	Kabupaten Nunukan	14,855	13,977	100	6.28
80	Kabupaten Ogan Ilir	7,113	6,763	100	5.18
81	Kota Padang	42,082	39,676	100	6.06
82	Kota Palu	15,315	14,586	100	5.00
83	Kabupaten Pangandaran	7,309	6,940	100	5.32
84	Kota Pangkalpinang	8,783	8,358	100	5.08
85	Kabupaten Panukal Abab Lematang Ilir	4,431	4,165	100	6.39
86	Kota Parepare	4,639	4,394	100	5.58
87	Kabupaten Paser	34,362	33,138	100	3.69
88	Kota Pasuruan	5,650	5,354	100	5.53
89	Kabupaten Pesawaran	10,859	10,337	100	5.05
90	Kabupaten Poso	6,098	5,744	100	6.16
91	Kabupaten Pringsewu	7,370	7,019	100	5.00
92	Kabupaten Pulau Morotai	989	927	100	6.69
93	Kabupaten Raja Ampat	2,232	2,134	100	4.59
94	Kabupaten Rembang	12,940	12,220	100	5.89
95	Kota Sabang	1,075	1,015	100	5.91
96	Kota Salatiga	9,128	8,624	100	5.84
97	Kabupaten Samosir	2,932	2,777	100	5.58
98	Kabupaten Sekadau	4,072	3,848	100	5.82
99	Kabupaten Seluma	2,736	2,611	100	4.79
100	Kabupaten Serang	51,754	49,155	100	5.29
101	Kabupaten Siak	52,595	52,030	100	1.09
102	Kota Sibolga	3,394	3,225	100	5.24
103	Kota Singkawang	6,540	6,250	100	4.64
104	Kabupaten Sintang	9,131	8,683	100	5.16
105	Kabupaten Sleman	33,138	31,141	100	6.41
106	Kabupaten Solok	9,430	8,965	100	5.19
107	Kabupaten Sorong	8,427	7,975	100	5.67
108	Kota Sorong	10,168	9,526	100	6.74
109	Kabupaten Sukabumi	44,141	41,716	100	5.81
110	Kabupaten Sumbawa	9,986	9,587	100	4.16
111	Kota Surakarta	33,506	31,685	100	5.75
112	Kabupaten Tabanan	14,949	14,142	100	5.71

113	Kabupaten Takalar	6,191	5,804	100	6.67
114	Kabupaten Tambrauw	141	134	100	5.22
115	Kabupaten Tanah Bumbu	9,121	8,845	100	3.12
116	Kabupaten Tanah Datar	9,225	8,782	100	5.04
117	Kabupaten Tanggerang	92,011	86,964	100	5.80
118	Kota Tangerang selatan	55,999	52,099	100	7.49
119	Kota Tanjungpinang	13,979	13,545	100	3.20
120	Kabupaten Tebo	9,700	9,239	100	4.99
121	Kota Ternate	6,736	6,222	100	8.26
122	Kota Tomohon	2,963	2,792	100	6.12
123	Kabupaten Wakatobi	2,883	2,707	100	6.50
124	Kabupaten Way Kanan	9,103	8,654	100	5.19
125	Kota Yogyakarta	26,127	24,768	100	5.49



## LAMPIRAN 5 Tingkat Pendidikan Kepala Daerah

NO.	Kabupaten dan Kota	Tingkat Pendidikan					Nilai	Keterangan
		SLTA = 1	Diploma = 2	S-1 = 3	S-2 = 4	S-3 = 5		
1	Kabupaten Asmat			3			3	Strata 1
2	Kabupaten Badung			3			3	Strata 1
3	Kabupaten Balangan				4		4	Strata 2
4	Kota Banda Aceh				4		4	Strata 2
5	Kota Bandar Lampung				4		4	Strata 2
6	Kabupaten Banggai				4		4	Strata 2
7	Kabupaten Bangka Selatan				4		4	Strata 2
8	Kabupaten Bangka Tengah					5	5	Strata 3
9	Kota Banjarbaru				4		4	Strata 2
10	Kabupaten Banjarnegara	1					1	SLTA
11	Kabupaten Bantul			3			3	Strata 1
12	Kota Batam				4		4	Strata 2
13	Kota Batu				4		4	Strata 2
14	Kabupaten Bekasi			3			3	Strata 1
15	Kabupaten Belitung Timur			3			3	Strata 1
16	Kabupaten Bengkulu				4		4	Strata 2
17	Kabupaten Berau				4		4	Strata 2
18	Kota Bitung				4		4	Strata 2
19	Kabupaten Blitar				4		4	Strata 2
20	Kabupaten Boalemo			3			3	Strata 1
21	Kabupaten Bone bolango					5	5	Strata 3
22	Kota Bontang			3			3	Strata 1
23	Kabupaten Brebes				4		4	Strata 2
24	Kabupaten Bulungan			3			3	Strata 1
25	Kabupaten Bungo				4		4	Strata 2
26	Kabupaten Buol					5	5	Strata 3
27	Kabupaten Buru				4		4	Strata 2
28	Kabupaten Buru Selatan					5	5	Strata 3
29	Kota Cilegon				4		4	Strata 2
30	Kabupaten Cianjur				4		4	Strata 2
31	Kota Denpasar				4		4	Strata 2

32	Kota Depok				4		4	Strata 2
33	Kabupaten Dompu			3			3	Strata 1
34	Kota Dumai				4		4	Strata 2
35	Kabupaten Gorontalo					5	5	Strata 3
36	Kabupaten Gowa				4		4	Strata 2
37	Kabupaten Gresik					5	5	Strata 3
38	Kabupaten Gunungkidul			3			3	Strata 1
39	Kabupaten Halmahera tengah				4		4	Strata 2
40	Kabupaten Halmahera Utara			3			3	Strata 1
41	Kabupaten Hulu Sungai tengah				4		4	Strata 2
42	Kabupaten Jayapura				4		4	Strata 2
43	Kota Jayapura					5	5	Strata 3
44	Kabupaten Jembrana				4		4	Strata 2
45	Kabupaten Jepara			3			3	Strata 1
46	Kabupaten Karimun					5	5	Strata 3
47	Kabupaten Karo			3			3	Strata 1
48	Kabupaten Kaur				4		4	Strata 2
49	Kota Kendari				4		4	Strata 2
50	Kabupaten Kolaka				4		4	Strata 2
51	Kota Kupang					5	5	Strata 3
52	Kabupaten Lamongan				4		4	Strata 2
53	Kabupaten Landak					5	5	Strata 3
54	Kabupaten Lembata			3			3	Strata 1
55	Kota Lhoksumawe	1					1	SLTA
56	Kabupaten Lingga			3			3	Strata 1
57	Kabupaten Lombok Utara					5	5	Strata 3
58	Kabupaten Mahakam Ulu			3			3	Strata 1
59	Kabupaten Majene					5	5	Strata 3
60	Kabupaten Malaka					5	5	Strata 3
61	Kabupaten Malinau					5	5	Strata 3
62	Kabupaten Maluku Barat Daya			3			3	Strata 1
63	Kabupaten Maluku tengah			3			3	Strata 1
64	Kabupaten Mamuju				4		4	Strata 2

65	Kabupaten Mamuju Tengah	1					1	SLTA
66	Kabupaten Maros				4		4	Strata 2
67	Kota Mataram			3			3	Strata 1
68	Kabupaten Merauke				4		4	Strata 2
69	Kota Metro			3			3	Strata 1
70	Kabupaten Minahasa Selatan				4		4	Strata 2
71	Kabupaten Minahasa Utara			3			3	Strata 1
72	Kabupaten Mojokerto			3			3	Strata 1
73	Kabupaten Muara Jambi				4		4	Strata 2
74	Kabupaten Mukomuko			3			3	Strata 1
75	Kabupaten Muna			3			3	Strata 1
76	Kabupaten Musi Rawas				4		4	Strata 2
77	Kabupaten Natuna				4		4	Strata 2
78	Kabupaten Ngada			3			3	Strata 1
79	Kabupaten Nunukan				4		4	Strata 2
80	Kabupaten Ogan Ilir				4		4	Strata 2
81	Kota Padang			3			3	Strata 1
82	Kota Palu				4		4	Strata 2
83	Kabupaten Pangandaran			3			3	Strata 1
84	Kota Pangkalpinang					5	5	Strata 3
85	Kabupaten Panukal Abab Lematang Ilir				4		4	Strata 2
86	Kota Parepare					5	5	Strata 3
87	Kabupaten Paser				4		4	Strata 2
88	Kota Pasuruan				4		4	Strata 2
89	Kabupaten Pesawaran			3			3	Strata 1
90	Kabupaten Poso	1					1	SLTA
91	Kabupaten Pringsewu	1					1	SLTA
92	Kabupaten Pulau Morotai	1					1	SLTA
93	Kabupaten Raja Ampat			3			3	Strata 1
94	Kabupaten Rembang			3			3	Strata 1
95	Kota Sabang	1					1	SLTA
96	Kota Salatiga			3			3	Strata 1
97	Kabupaten Samosir				4		4	Strata 2
98	Kabupaten Sekadau				4		4	Strata 2

99	Kabupaten Seluma				4		4	Strata 2
100	Kabupaten Serang				4		4	Strata 2
101	Kabupaten Siak				4		4	Strata 2
102	Kota Sibolga				4		4	Strata 2
103	Kota Singkawang			3			3	Strata 1
104	Kabupaten Sintang					5	5	Strata 3
105	Kabupaten Sleman				4		4	Strata 2
106	Kabupaten Solok				4		4	Strata 2
107	Kabupaten Sorong					5	5	Strata 3
108	Kota Sorong				4		4	Strata 2
109	Kabupaten Sukabumi				4		4	Strata 2
110	Kabupaten Sumbawa			3			3	Strata 1
111	Kota Surakarta	1					1	SLTA
112	Kabupaten Tabanan	1					1	SLTA
113	Kabupaten Takalar				4		4	Strata 2
114	Kabupaten Tambrauw				4		4	Strata 2
115	Kabupaten Tanah Bumbu	1					1	SLTA
116	Kabupaten Tanah Datar			3			3	Strata 1
117	Kabupaten Tanggerang				4		4	Strata 2
118	Kota Tangerang selatan				4		4	Strata 2
119	Kota Tanjungpinang			3			3	Strata 1
120	Kabupaten Tebo				4		4	Strata 2
121	Kota Ternate					5	5	Strata 3
122	Kota Tomohon			3			3	Strata 1
123	Kabupaten Wakatobi				4		4	Strata 2
124	Kabupaten Way Kanan				4		4	Strata 2
125	Kota Yogyakarta			3			3	Strata 1

## LAMPIRAN 6 Umur Pemerintah Daerah

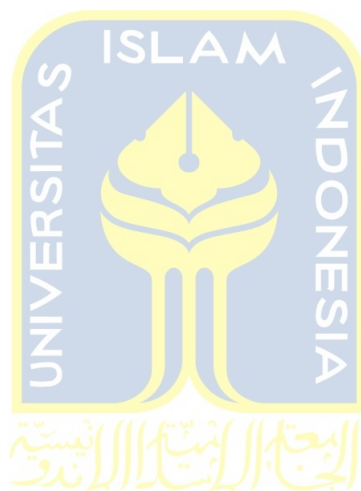
No.	Kabupaten dan Kota	Umur Pemerintah Daerah
1	Kabupaten Asmat	16
2	Kabupaten Badung	27
3	Kabupaten Balangan	16
4	Kota Banda Aceh	62
5	Kota Bandar Lampung	36
6	Kabupaten Banggai	60
7	Kabupaten Bangka Selatan	16
8	Kabupaten Bangka Tengah	16
9	Kota Banjarbaru	20
10	Kabupaten Banjarnegara	65
11	Kabupaten Bantul	63
12	Kota Batam	28
13	Kota Batu	16
14	Kabupaten Bekasi	68
15	Kabupaten Belitung Timur	16
16	Kabupaten Bengkulu	63
17	Kabupaten Berau	60
18	Kota Bitung	44
19	Kabupaten Blitar	63
20	Kabupaten Boalemo	19
21	Kabupaten Bone	16
22	Kota Bontang	19
23	Kabupaten Brebes	74
24	Kabupaten Bulungan	60
25	Kabupaten Bungo	53
26	Kabupaten Buol	19
27	Kabupaten Buru	19
28	Kabupaten Buru Selatan	11
29	Kota Cilegon	20
30	Kabupaten Cianjur	50
31	Kota Denpasar	61
32	Kota Depok	20
33	Kabupaten Dompur	71
34	Kota Dumai	19
35	Kabupaten Gorontalo	59

36	Kabupaten Gowa	60
37	Kabupaten Gresik	44
38	Kabupaten Gunungkidul	35
39	Kabupaten Halmahera tengah	50
40	Kabupaten Halmahera Utara	16
41	Kabupaten Hulu Sungai tengah	60
42	Kabupaten Jayapura	50
43	Kota Jayapura	40
44	Kabupaten Jembrana	61
45	Kabupaten Jepara	74
46	Kabupaten Karimun	19
47	Kabupaten Karo	73
48	Kabupaten Kaur	15
49	Kota Kendari	24
50	Kabupaten Kolaka	68
51	Kota Kupang	50
52	Kabupaten Lamongan	64
53	Kabupaten Landak	20
54	Kabupaten Lembata	52
55	Kota Lhoksumawe	49
56	Kabupaten Lingga	16
57	Kabupaten Lombok Utara	11
58	Kabupaten Mahakam Ulu	5
59	Kabupaten Majene	60
60	Kabupaten Malaka	6
61	Kabupaten Malinau	20
62	Kabupaten Maluku Barat Daya	10
63	Kabupaten Maluku tengah	61
64	Kabupaten Mamuju	60
65	Kabupaten Mamuju Tengah	6
66	Kabupaten Maros	66
67	Kota Mataram	60
68	Kabupaten Merauke	49
69	Kota Metro	72
70	Kabupaten Minahasa Selatan	15
71	Kabupaten Minahasa Utara	15
72	Kabupaten Mojokerto	69
73	Kabupaten Muara Jambi	20
74	Kabupaten Mukomuko	16



75	Kabupaten Muna	59
76	Kabupaten Musi Rawas	76
77	Kabupaten Natuna	19
78	Kabupaten Ngada	61
79	Kabupaten Nunukan	19
80	Kabupaten Ogan Ilir	16
81	Kota Padang	62
82	Kota Palu	41
83	Kabupaten Pangandaran	7
84	Kota Pangkalpinang	63
85	Kabupaten Panukal Abab Lematang Ilir	5
86	Kota Parepare	10
87	Kabupaten Paser	12
88	Kota Pasuruan	58
89	Kabupaten Pesawaran	12
90	Kabupaten Poso	66
91	Kabupaten Pringsewu	11
92	Kabupaten Pulau Morotai	10
93	Kabupaten Raja Ampat	16
94	Kabupaten Rembang	74
95	Kota Sabang	54
96	Kota Salatiga	24
97	Kabupaten Samosir	14
98	Kabupaten Sekadau	15
99	Kabupaten Seluma	15
100	Kabupaten Serang	19
101	Kabupaten Siak	20
102	Kota Sibolga	73
103	Kota Singkawang	18
104	Kabupaten Sintang	60
105	Kabupaten Sleman	83
106	Kabupaten Solok	63
107	Kabupaten Sorong	52
108	Kota Sorong	19
109	Kabupaten Sukabumi	58
110	Kabupaten Sumbawa	74
111	Kota Surakarta	73
112	Kabupaten Tabanan	76
113	Kabupaten Takalar	59

114	Kabupaten Tambrauw	10
115	Kabupaten Tanah Bumbu	16
116	Kabupaten Tanah Datar	63
117	Kabupaten Tangerang	75
118	Kota Tangerang selatan	10
119	Kota Tanjungpinang	17
120	Kabupaten Tebo	19
121	Kota Ternate	19
122	Kota Tomohon	16
123	Kabupaten Wakatobi	15
124	Kabupaten Way Kanan	19
125	Kota Yogyakarta	72



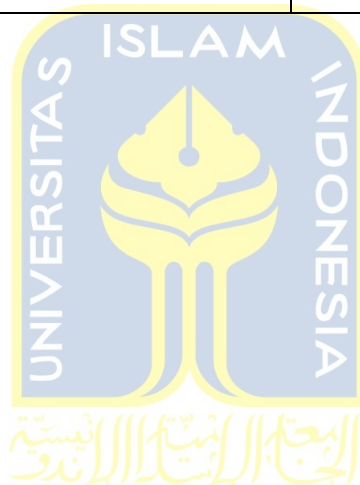
## LAMPIRAN 7 Indeks Pembangunan Manusia

No.	Kabupaten dan Kota	Indeks Pembangunan Manusia
1	Kabupaten Asmat	49.37
2	Kabupaten Badung	80.87
3	Kabupaten Balangan	67.88
4	Kota Banda Aceh	84.37
5	Kota Bandar Lampung	76.63
6	Kabupaten Banggai	69.85
7	Kabupaten Bangka Selatan	65.98
8	Kabupaten Bangka Tengah	69.52
9	Kota Banjarbaru	78.83
10	Kabupaten Banjarnegara	66.54
11	Kabupaten Bantul	79.45
12	Kota Batam	80.54
13	Kota Batu	75.04
14	Kabupaten Bekasi	73.49
15	Kabupaten Belitung Timur	70.22
16	Kabupaten Bengkulu	72.94
17	Kabupaten Berau	74.01
18	Kota Bitung	73.27
19	Kabupaten Blitar	69.93
20	Kabupaten Boalemo	64.99
21	Kabupaten Bone bolango	69.06
22	Kota Bontang	79.86
23	Kabupaten Brebes	65.68
24	Kabupaten Bulungan	71.23
25	Kabupaten Bungo	69.42
26	Kabupaten Buol	67.30
27	Kabupaten Buru	68.25
28	Kabupaten Buru Selatan	63.62
29	Kota Cilegon	72.65
30	Kabupaten Cianjur	64.62
31	Kota Denpasar	83.30
32	Kota Depok	80.29
33	Kabupaten Dompu	66.97
34	Kota Dumai	74.06

35	Kabupaten Gorontalo	65.78
36	Kabupaten Gowa	68.87
37	Kabupaten Gresik	75.28
38	Kabupaten Gunungkidul	69.24
39	Kabupaten Halmahera tengah	64.66
40	Kabupaten Halmahera Utara	67.30
41	Kabupaten Hulu Sungai tengah	68.32
42	Kabupaten Jayapura	71.25
43	Kota Jayapura	79.58
44	Kabupaten Jembrana	71.65
45	Kabupaten Jepara	71.38
46	Kabupaten Karimun	70.56
47	Kabupaten Karo	73.91
48	Kabupaten Kaur	66.20
49	Kota Kendari	82.22
50	Kabupaten Kolaka	72.07
51	Kota Kupang	78.84
52	Kabupaten Lamongan	71.97
53	Kabupaten Landak	65.45
54	Kabupaten Lembata	63.96
55	Kota Lhoksumawe	76.62
56	Kabupaten Lingga	64.04
57	Kabupaten Lombok Utara	63.83
58	Kabupaten Mahakam Ulu	66.67
59	Kabupaten Majene	66.01
60	Kabupaten Malaka	59.66
61	Kabupaten Malinau	71.74
62	Kabupaten Maluku Barat Daya	60.64
63	Kabupaten Maluku tengah	70.60
64	Kabupaten Mamuju	67.11
65	Kabupaten Mamuju Tengah	64.43
66	Kabupaten Maros	68.94
67	Kota Mataram	78.43
68	Kabupaten Merauke	69.38
69	Kota Metro	76.22
70	Kabupaten Minahasa Selatan	70.86
71	Kabupaten Minahasa Utara	73.05
72	Kabupaten Mojokerto	72.64
73	Kabupaten Muaro Jambi	68.34

74	Kabupaten Mukomuko	67.47
75	Kabupaten Muna	68.47
76	Kabupaten Musi Rawas	66.18
77	Kabupaten Natuna	72.10
78	Kabupaten Ngada	67.10
79	Kabupaten Nunukan	65.67
80	Kabupaten Ogan Ilir	66.43
81	Kota Padang	82.25
82	Kota Palu	80.91
83	Kabupaten Pangandaran	67.44
84	Kota Pangkalpinang	77.43
85	Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	63.49
86	Kota Parepare	77.19
87	Kabupaten Paser	71.61
88	Kota Pasuruan	74.78
89	Kabupaten Pesawaran	64.97
90	Kabupaten Poso	70.68
91	Kabupaten Pringsewu	69.42
92	Kabupaten Pulau Morotai	61.39
93	Kabupaten Raja Ampat	62.84
94	Kabupaten Rembang	69.46
95	Kota Sabang	74,82
96	Kota Salatiga	82.41
97	Kabupaten Samosir	69.99
98	Kabupaten Sekadau	63.69
99	Kabupaten Seluma	65.99
100	Kabupaten Serang	71.68
101	Kabupaten Siak	73.73
102	Kota Sibolga	72.65
103	Kota Singkawang	71.08
104	Kabupaten Sintang	66.07
105	Kabupaten Sleman	83.42
106	Kabupaten Solok	68.60
107	Kabupaten Sorong	64.32
108	Kota Sorong	77.35
109	Kabupaten Sukabumi	66.05
110	Kabupaten Sumbawa	66.77
111	Kota Surakarta	81.46
112	Kabupaten Tabanan	75.45

113	Kabupaten Takalar	66.07
114	Kabupaten Tambrauw	51.95
115	Kabupaten Tanah Bumbu	70.05
116	Kabupaten Tanah Datar	71.25
117	Kabupaten Tangerang	71.59
118	Kota Tangerang selatan	81.17
119	Kota Tanjungpinang	78.33
120	Kabupaten Tebo	68.67
121	Kota Ternate	79.13
122	Kota Tomohon	75.78
123	Kabupaten Wakatobi	68.52
124	Kabupaten Way Kanan	66.63
125	Kota Yogyakarta	86.11



## LAMPIRAN 8 Umur Kepala Daerah

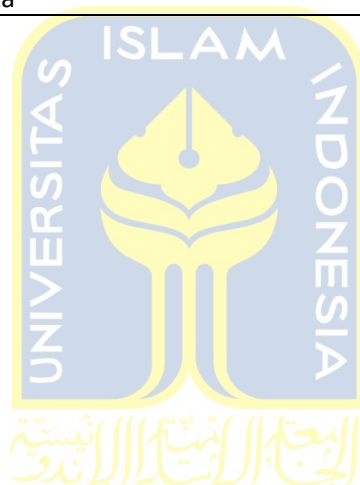
No.	Kabupaten dan Kota	Umur kepala Daerah
1	Kabupaten Asmat	55
2	Kabupaten Badung	47
3	Kabupaten Balangan	61
4	Kota Banda Aceh	61
5	Kota Bandar Lampung	63
6	Kabupaten Banggai	53
7	Kabupaten Bangka Selatan	68
8	Kabupaten Bangka Tengah	57
9	Kota Banjarbaru	49
10	Kabupaten Banjarnegara	56
11	Kabupaten Bantul	62
12	Kota Batam	56
13	Kota Batu	56
14	Kabupaten Bekasi	46
15	Kabupaten Belitung Timur	67
16	Kabupaten Bengkulu	46
17	Kabupaten Berau	51
18	Kota Bitung	62
19	Kabupaten Blitar	66
20	Kabupaten Boalemo	59
21	Kabupaten Bone bolango	50
22	Kota Bontang	59
23	Kabupaten Brebes	48
24	Kabupaten Bulungan	65
25	Kabupaten Bungo	60
26	Kabupaten Buol	60
27	Kabupaten Buru	48
28	Kabupaten Buru Selatan	51
29	Kota Cilegon	63
30	Kabupaten Cianjur	38
31	Kota Denpasar	52
32	Kota Depok	58
33	Kabupaten Dompu	42
34	Kota Dumai	64

35	Kabupaten Gorontalo	56
36	Kabupaten Gowa	33
37	Kabupaten Gresik	59
38	Kabupaten Gunungkidul	70
39	Kabupaten Halmahera tengah	52
40	Kabupaten Halmahera Utara	63
41	Kabupaten Hulu Sungai tengah	52
42	Kabupaten Jayapura	59
43	Kota Jayapura	54
44	Kabupaten Jembrana	57
45	Kabupaten Jepara	46
46	Kabupaten Karimun	54
47	Kabupaten Karo	55
48	Kabupaten Kaur	46
49	Kota Kendari	41
50	Kabupaten Kolaka	60
51	Kota Kupang	59
52	Kabupaten Lamongan	64
53	Kabupaten Landak	37
54	Kabupaten Lembata	56
55	Kota Lhoksumawe	49
56	Kabupaten Lingga	56
57	Kabupaten Lombok Utara	47
58	Kabupaten Mahakam Ulu	52
59	Kabupaten Majene	56
60	Kabupaten Malaka	66
61	Kabupaten Malinau	59
62	Kabupaten Maluku Barat Daya	50
63	Kabupaten Maluku tengah	63
64	Kabupaten Mamuju	61
65	Kabupaten Mamuju Tengah	62
66	Kabupaten Maros	52
67	Kota Mataram	46
68	Kabupaten Merauke	47
69	Kota Metro	69
70	Kabupaten Minahasa Selatan	51
71	Kabupaten Minahasa Utara	57
72	Kabupaten Mojokerto	41
73	Kabupaten Muara Jambi	42



74	Kabupaten Mukomuko	49
75	Kabupaten Muna	46
76	Kabupaten Musi Rawas	55
77	Kabupaten Natuna	66
78	Kabupaten Ngada	65
79	Kabupaten Nunukan	33
80	Kabupaten Ogan Ilir	53
81	Kota Padang	52
82	Kota Palu	56
83	Kabupaten Pangandaran	55
84	Kota Pangkalpinang	43
85	Kabupaten Panukal Abab Lematang Ilir	55
86	Kota Parepare	53
87	Kabupaten Paser	69
88	Kota Pasuruan	64
89	Kabupaten Pesawaran	36
90	Kabupaten Poso	54
91	Kabupaten Pringsewu	59
92	Kabupaten Pulau Morotai	46
93	Kabupaten Raja Ampat	46
94	Kabupaten Rembang	57
95	Kota Sabang	47
96	Kota Salatiga	52
97	Kabupaten Samosir	51
98	Kabupaten Sekadau	53
99	Kabupaten Seluma	60
100	Kabupaten Serang	52
101	Kabupaten Siak	52
102	Kota Sibolga	60
103	Kota Singkawang	47
104	Kabupaten Sintang	59
105	Kabupaten Sleman	58
106	Kabupaten Solok	65
107	Kabupaten Sorong	49
108	Kota Sorong	56
109	Kabupaten Sukabumi	56
110	Kabupaten Sumbawa	64
111	Kota Surakarta	59
112	Kabupaten Tabanan	53

113	Kabupaten Takalar	44
114	Kabupaten Tambrauw	55
115	Kabupaten Tanah Bumbu	46
116	Kabupaten Tanah Datar	46
117	Kabupaten Tangerang	45
118	Kota Tangerang selatan	42
119	Kota Tanjungpinang	58
120	Kabupaten Tebo	50
121	Kota Ternate	62
122	Kota Tomohon	52
123	Kabupaten Wakatobi	54
124	Kabupaten Way Kanan	40
125	Kota Yogyakarta	55



## LAMPIRAN 9 Statistik Deskriptif

## Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pertumbuhan Ekonomi	125	-4.08	8.26	5.2657	1.64281
Ukuran Pemerintah	125	83653601476	20358502058	33654449236	28401537877
		5	443	89.51	86.408
Tingkat Pendidikan Kepala Daerah	125	1	5	3.62	1.014
Umur Pemerintah daerah	125	10	76	38.62	23.443
Indeks Pembangunan manusia	125	49.37	86.11	70.9263	6.32455
Umur kepala Daerah	125	33	70	53.99	7.886
Kinerja Keuangan	125	-.17	.34	.0405	.08106
Valid N (listwise)	125				

## Tingkat Pendidikan Kepala Daerah

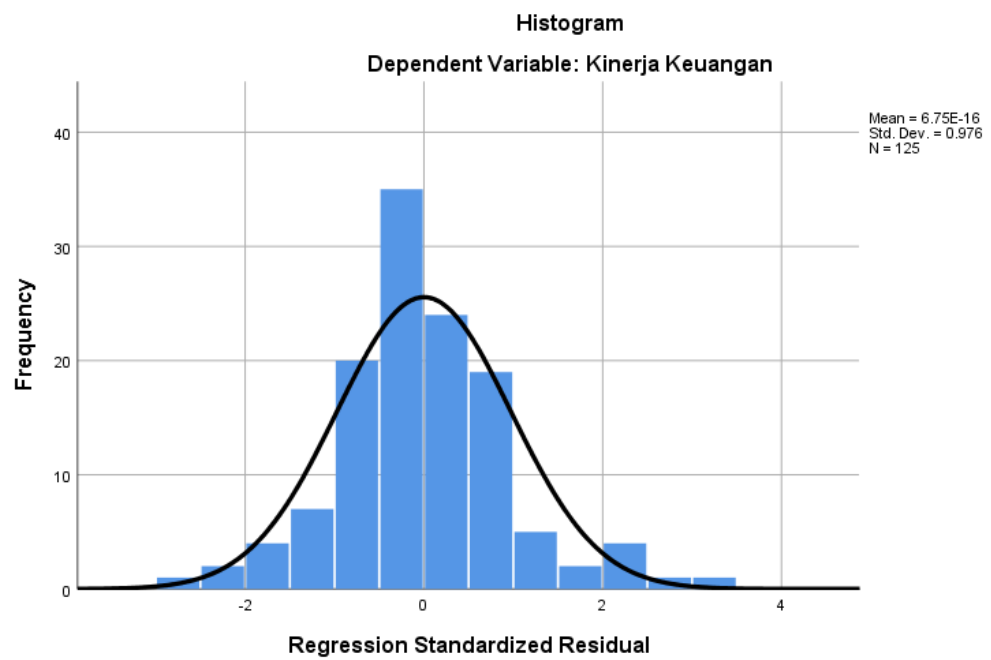
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SLTA	10	8.0	8.0	8.0
	Strata 1	37	29.6	29.6	37.6
	Strata 2	59	47.2	47.2	84.8
	Strata 3	19	15.2	15.2	100.0
	Total	125	100.0	100.0	

## LAMPIRAN 10 Uji Asumsi Klasik

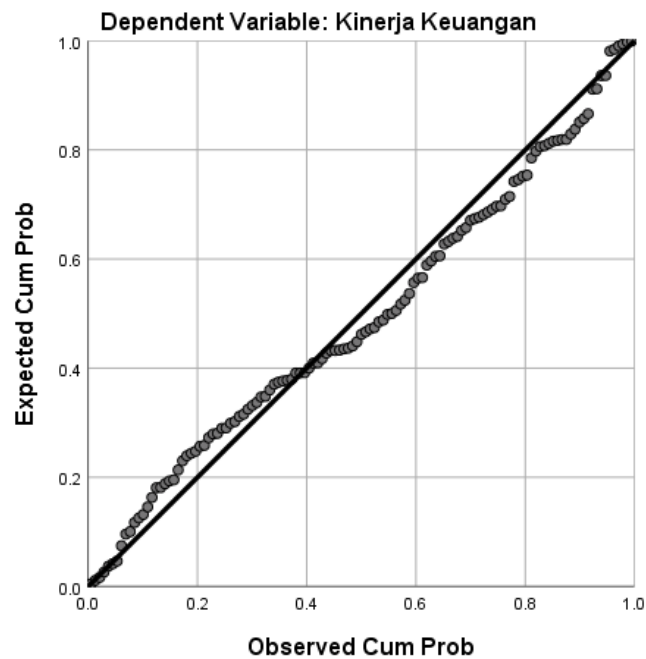
## a. Uji Normalitas

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		125
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.07712212
Most Extreme Differences	Absolute	.062
	Positive	.062
	Negative	-.058
Test Statistic		.062
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>



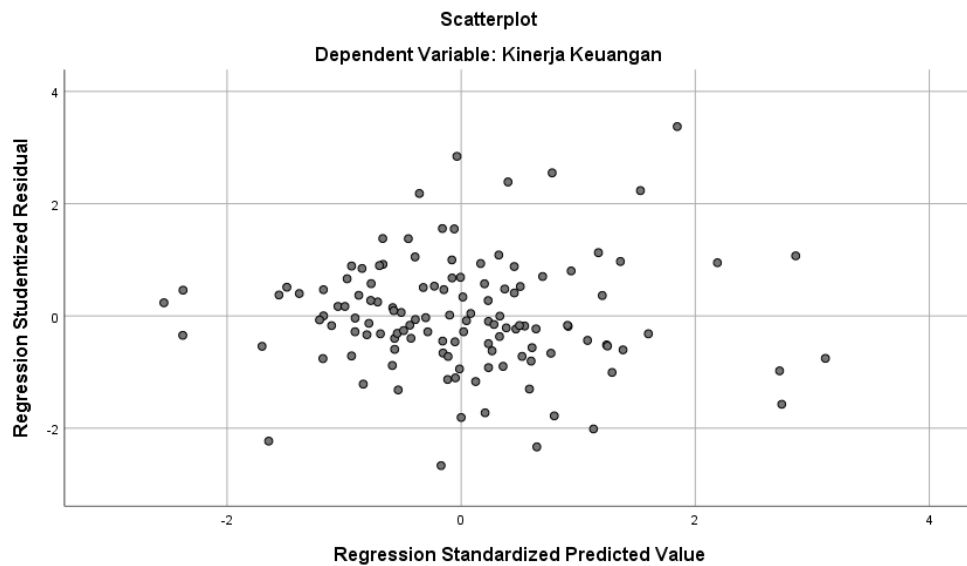
**Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual**



## b. Uji Heteroskedastisitas

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.124	.061		2.026	.045
	Pertumbuhan Ekonomi	-.004	.003	-.133	-1.519	.131
	Ukuran Pemerintah	9.608E-16	.000	.053	.548	.584
	Tingkat Pendidikan Kepala Daerah	.003	.004	.068	.776	.440
	Umur Pemerintah daerah	-.001	.000	-.239	-2.647	.059
	Indeks Pembangunan manusia	-.001	.001	-.133	-1.381	.170
	Umur kepala Daerah	.001	.001	.102	1.141	.256



## c. Uji Multikolinearitas

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Pertumbuhan Ekonomi	.976	1.024
	Ukuran Pemerintah	.788	1.269
	Tingkat Pendidikan Kepala Daerah	.979	1.022
	Umur Pemerintah daerah	.908	1.101
	Indeks Pembangunan manusia	.800	1.249
	Umur kepala Daerah	.922	1.084



## LAMPIRAN 11 Analisis Regresi

## a. Analisis Regresi Linear Berganda

		Coefficients <sup>a</sup>				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	.057	.099		.578	.564
	Pertumbuhan Ekonomi	-.007	.004	-.145	-1.638	.104
	Ukuran Pemerintah	4.830E-15	.000	.169	1.715	.089
	Tingkat Pendidikan Kepala Daerah	.013	.007	.163	1.841	.048
	Umur Pemerintah daerah	.000	.000	-.140	-1.523	.130
	Indeks Pembangunan manusia	.000	.001	-.038	-.386	.700
	Umur kepala Daerah	.000	.001	.020	.214	.831

## b. Analisis Koefisien Determinasi (R Square)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.308 <sup>a</sup>	.095	.049	.07906



**c. Uji Parsial (Uji T)**

		<b>Coefficients<sup>a</sup></b>				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	.057	.099		.578	.564
	Pertumbuhan Ekonomi	-.007	.004	-.145	-1.638	.104
	Ukuran Pemerintah	4.830E-15	.000	.169	1.715	.089
	Tingkat Pendidikan Kepala Daerah	.013	.007	.163	1.841	.048
	Umur Pemerintah daerah	.000	.000	-.140	-1.523	.130
	Indeks Pembangunan manusia	.000	.001	-.038	-.386	.700
	Umur kepala Daerah	.000	.001	.020	.214	.831

